



LAPORAN KINERJA PUSAT PENYULUHAN

2023

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



LAPORAN KINERJA 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Pusat Penyuluhan Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban Satker Pusat Penyuluhan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Laporan kinerja ini memuat uraian tentang gambaran umum, perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja Pusat Penyuluhan. Selain itu Laporan Kinerja juga memuat permasalahan yang dihadapi satker selama tahun 2023 dan upaya tindak lanjut.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja Pusat Penyuluhan tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.641.306.997,- atau 99,98%. Pusat Penyuluhan telah melaksanakan kegiatan dengan efektif dan efisien.

Atas tersusunnya laporan ini disampaikan ucapan terima kasih terhadap semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu mulai dari persiapan sampai dengan selesainya laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam upaya penyuluhan dan pendampingan terhadap pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.



Jakarta, 15 Januari 2024

Kepala Pusat Penyuluhan

Wahju Rudianto, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Pusat Penyuluhan dapat diukur melalui pencapaian 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Penyuluhan dengan Kepala Badan P2SDM. Capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2023 disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang juga memuat berbagai keberhasilan maupun kekurangan capaian IKK dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan peningkatan penyuluhan.

Sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023, IKK yang dimiliki Pusat Penyuluhan meliputi : (1) Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal); (2) Jumlah KTH (KTH Mandiri); dan (3) Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan.

Hasil pengukuran rata-rata capaian kinerja Pusat Penyuluhan pada tahun 2023 yaitu sebesar 100% dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 16.641.306.997,- atau 99,98% dari total pagu anggaran sebesar Rp.16.644.060.000,-. Adapun rasio efektivitas capaian kinerja sebesar 1 dan rasio efisiensi capaian kinerja sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa Pusat Penyuluhan telah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target kinerja Pusat Penyuluhan.



Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 tidak terlepas dari kendala anggaran fasilitasi yang rendah sehingga memperkecil ruang gerak pengembangan KTH yang mengakibatkan banyaknya pembatasan kegiatan baik dari sisi kesiapan unsur penyelenggara maupun di sisi masyarakat dan pemerintah daerah dimana lokasi masyarakat berada. Meskipun demikian, Pusat Penyuluhan berkomitmen untuk terus menyempurnakan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.

IKK 1 100%
Jumlah Penyuluh LHK yang
Ditingkatkan Kapasitasnya
(Penyuluh Handal)
sebanyak 1.000 orang



IKK 2 100%
Jumlah KTH
(KTH Mandiri)
sebanyak 30 KTH



IKK 3 100%
Lembaga Pelatihan
Pemagangan Usaha
Kehutanan Swadaya
Masyarakat (LP2UKS)
yang Dibentuk dan
Dikembangkan
sebanyak 20 KTH



DAFTAR ISI

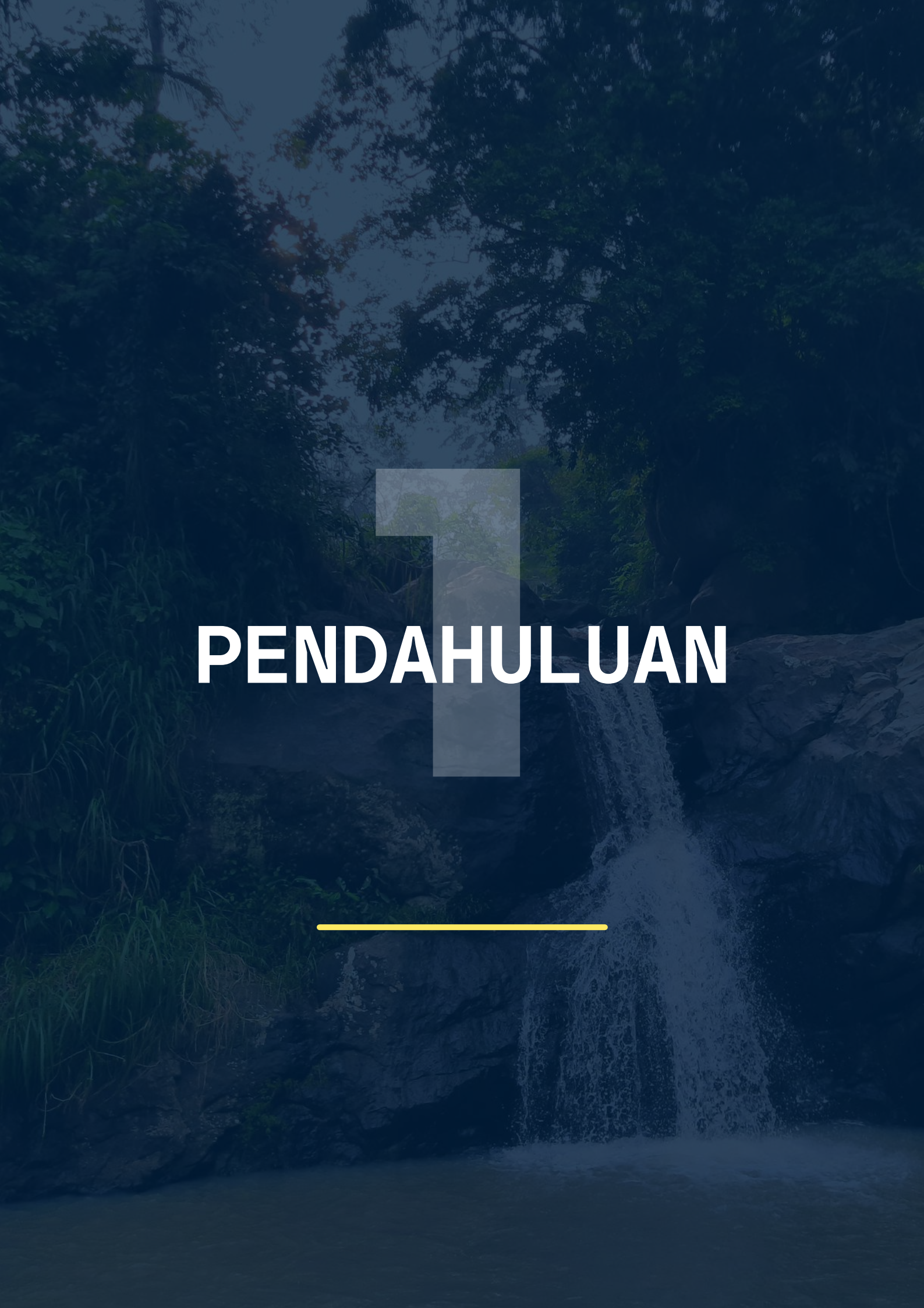
	KATA PENGANTAR	i
	RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
	DAFTAR ISI	v
	DAFTAR TABEL	vi
	DAFTAR GAMBAR	vii
1	PENDAHULUAN	
	Latar Belakang	02
	Tugas Pokok dan Fungsi	03
	Struktur Organisasi	04
	Sumber Daya Manusia	05
	Aset BMN Pusat Penyuluhan	06
2	PERENCANAAN KINERJA	
	Perencanaan Kinerja	08
	Rencana Strategis Tahun 2020-2024	10
	Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023	14
	Perjanjian Kinerja	16
3	AKUNTABILITAS KINERJA	
	Reviu atas Dokumen Perencanaan	18
	Reviu atas Hasil Evaluasi SAKIP	19
	Metode Pengukuran Kinerja	21
	Hasil Pengukuran Kinerja	22
	Efektivitas Capaian Kinerja	24
	Indikator Kinerja 1	27
	Indikator Kinerja 2	37
	Indikator Kinerja 3	43
	Realisasi Anggaran	54
4	PENUTUP	
	Penutup	60
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

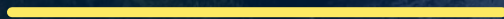
1.1	Peta Jabatan Pusat Penyuluhan.....	05
1.2	Aset BMN Pusat Penyuluhan	06
2.1	Kegiatan Pusat Penyuluhan dalam Mendukung Prioritas Nasional 3	09
2.2	Target Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020 - 2024.....	13
2.3	Target Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2023	14
2.4	Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023.....	16
3.1	Perubahan Anggaran Lingkup Kantor Pusat Badan P2SDM Tahun 2023.....	18
3.2	Hasil Penilaian SAKIP Mandiri Pusat Penyuluhan Tahun 2023	19
3.3	Rekomendasi dan Tindaklanjut Hasil Penilaian SAKIP Mandiri Pusat Penyuluhan Tahun 2023	20
3.4	Capaian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023	22
3.5	Efektivitas Capaian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023.....	24
3.6	Efisiensi Capaian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023.....	25
3.7	Progres Capaian s.d. Tahun 2023 Terhadap Renstra Tahun 2020 - 2024	26
3.8	Rincian Pencapaian Kinerja Jumlah Penyuluh dan/atau Pendamping Handal	28
3.9	Realisasi Anggaran Per Rincian Output	55

DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Tahun 2023	04
1.2	Jumlah SDM Pusat Penyuluhan Berdasarkan Jenis Kelamin	05
2.1	Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2023	08
2.2	Pohon Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2020 - 2024	11
2.3	Alokasi Pagu Anggaran Awal TA. 2023	15
2.4	Alokasi Pagu Anggaran Akhir TA. 2023	15
3.1	Metode Pengukuran Kinerja	21
3.2	Jumlah KTH Mandiri pada Setiap Provinsi dan Komoditas yang Dikembangkan	38
3.3	KTH Penerima Fasilitas Pembentukan LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya Beserta Komoditas yang Diusahakannya	46
3.4	KTH Penerima Fasilitas Pengembangan LP2UKS/ Wanawiyata Beserta Komoditas yang Diusahakannya	47
3.5	Perbandingan Tren Realisasi Anggaran Tahun 2022 - 2023	54
3.6	Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal Pusat Penyuluhan	55



1 PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Pusat Penyuluhan merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusat Penyuluhan mengemban amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pusat Penyuluhan melaksanakan tugas berlandaskan pada asas *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Asas akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini disusun sebagai perwujudan tanggung jawab dan pelaporan kinerja Pusat Penyuluhan sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Laporan ini juga dimaksudkan sebagai masukan dan pertimbangan dalam perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan di masa yang akan datang.





1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pusat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1

Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;

2

Penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;

3

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;

4

Bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;

5

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan

6

Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan administrasi Pusat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Penyuluhan berkedudukan sebagai Eselon II yang dikepalai oleh Kepala Pusat. Pusat Penyuluhan mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana struktur organisasi pada Gambar 1.1.

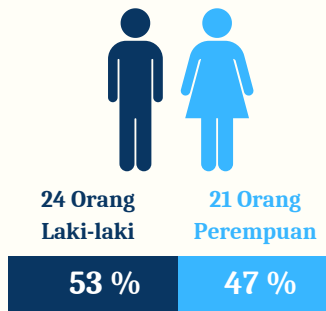


Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Tahun 2023.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

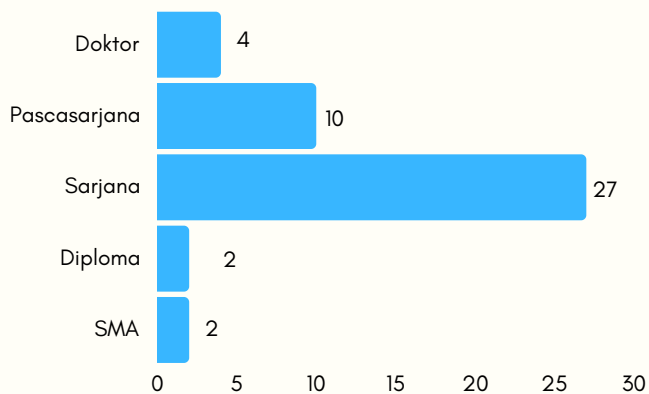
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target kinerja, pada tahun 2023 Pusat Penyuluhan didukung oleh 45 orang pegawai yang terdiri dari 42 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan sebaran sebagaimana tabel berikut:

Jenis Kelamin

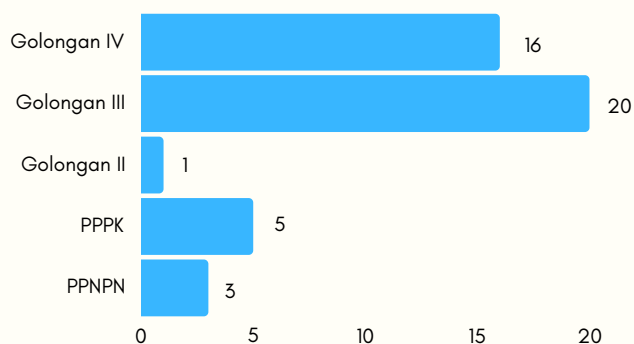


Gambar 1.2. Jumlah SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan jenis kelamin.

Pendidikan



Golongan



Tabel 1.1. Peta Jabatan Pusat Penyuluhan.

No	Nama Jabatan	Jumlah
I	PUSAT PENYULUHAN	1
1	Kepala Pusat Penyuluhan	1
II	SUB BAGIAN TATA USAHA	9
1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
2	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1
3	Analisis Keuangan	1
4	Bendahara	1
5	Verifikator Keuangan	1
6	Pengelola BMN	1
7	Staf PPNPN	3
III	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	29
1	Penyuluh Kehutanan Utama	4
2	Penyuluh Kehutanan Madya	10
3	Penyuluh Kehutanan Muda	8
4	Penyuluh Kehutanan Pertama	3
5	Perencana Ahli Madya	1
6	Perencana Ahli Pertama	3
IV	JABATAN PELAKSANA TEKNIS	6
1	Analisis Metode Penyuluhan	1
2	Analisis Kapasitas Penyuluhan	4
3	Analisis Kelembagaan Masyarakat	1

1.5. ASET BMN PUSAT PENYULUHAN

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusat Penyuluhan memiliki aset atau Barang Milik Negara (BMN). Aset yang dikelola oleh Pusat Penyuluhan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Aset BMN Pusat Penyuluhan.

Kode Barang	Jenis Barang	Jumlah Unit	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
3020101001	Jeep	1	1	-	-
3020104001	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	10	9	-	1
3020104001	Sepeda Motor	1.264	14	1.250	-
3050104001	Lemari Besi Metal	12	12	-	-
3050104002	Lemari Kayu	5	5	-	-
3050104005	Filing Cabinet Besi	4	4	-	-
3050104007	Brandkas	5	5	-	-
3050104009	Kardex Besi	12	10	-	2
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	1	1	-	-
3050105010	White Board	1	-	-	1
3050105048	LCD Projector/Infocus	1	-	-	1
3050201002	Meja Kerja Kayu	40	40	-	-
3050201003	Kursi Besi/Metal	116	67	-	49
3050201008	Meja Rapat	13	13	-	-
3050201009	Meja Komputer	14	14	-	-
3050204001	Lemari Es	3	3	-	-
3050204004	A.C Portable	4	2	-	2
3050204005	A.C Split	6	6	-	-
3050206002	Televisi	2	2	-	-
3050206021	Tustel	1	-	-	1
3050206036	Dispenser	1	1	-	-
3050206046	Handy Cam	1	-	-	1
3050206058	Gordyin/Kray	2	2	-	-
3050206068	DVD Player	2	-	-	2
3060102128	Camera Digital	5	5	-	-
3060102163	Duplicator DVD	1	-	-	1
3060105038	GPS Receiver	5	5	-	-
3060201001	Telephone (PABX)	1	1	-	-
3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	4	2	-	2
3060201010	Facsimile	1	1	-	-

Aset paling banyak adalah sepeda motor sejumlah 1.264 unit yang merupakan pengadaan tahun 2006, 2007, 2010, dan 2013 yang tersebar diberbagai provinsi, dan saat ini secara bertahap dilakukan proses penghapusan melalui hibah. Pada bulan Desember 2023 BMN yang rusak berat telah disetujui penghapusannya dan dalam proses pengajuan lelang ke KPKNL Jakarta.



PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang bertema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" merupakan upaya melanjutkan estafet pembangunan untuk lepas dari tekanan pandemi COVID-19 dengan memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Semangat yang diusung dalam RKP Tahun 2023 itu diimplementasikan dalam Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 yang bertema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan "Produktivitas Tapak Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Transformasi Ekonomi Indonesia" dengan pendekatan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki sasaran pertama derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk meyakinkan bergulirnya ekonomi sirkular. Kedua, keberdayaan masyarakat semakin merata di seluruh entitas tapak. Dan Ketiga, gambaran sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah mulai terlihat di sebagian besar provinsi. Dalam konteks pembangunan nasional, pada tahun 2023 Agenda Pembangunan (AP) / Prioritas Nasional (PN) masih sesuai dengan RPJMN tahun 2020 - 2024 dengan 7 Prioritas Nasional sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.1. Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan dalam 4 dari 7 Prioritas Nasional, yaitu :

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (PN 1);
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2);
- Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing (PN 3); dan
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6).



Gambar 2.1. Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2023.

Dari 4 (empat) PN yang menjadi agenda Kementerian LHK, Badan P2SDM mendukung 3 (tiga) PN yaitu : PN-1, PN-3 dan PN-6. Adapun kegiatan pada Pusat Penyuluhan termasuk ke dalam PN-3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Secara lebih rinci kegiatan Pusat Penyuluhan yang termasuk ke dalam PN-3 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 2.1. Kegiatan Pusat Penyuluhan dalam Mendukung Prioritas Nasional 3.

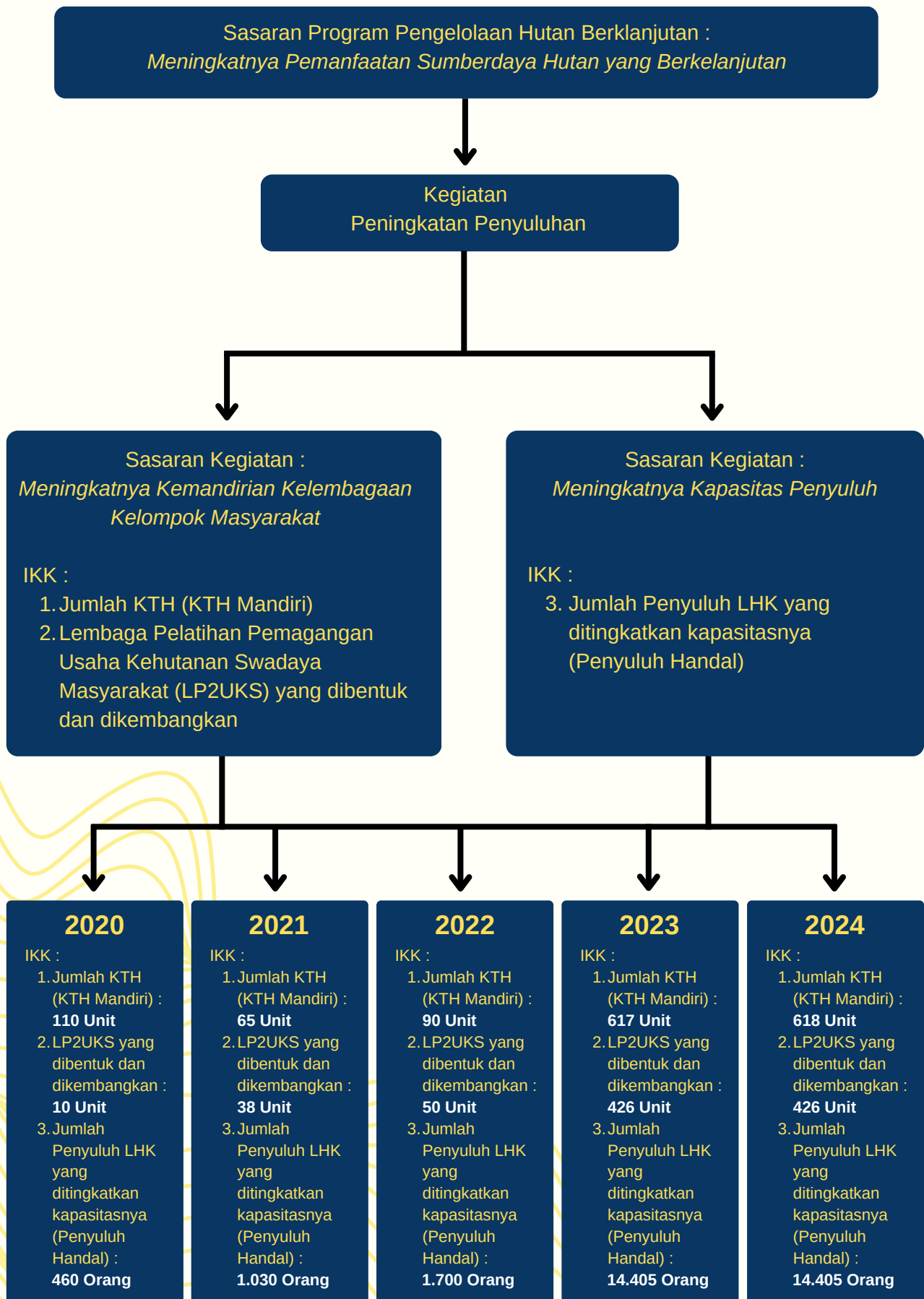
Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output
Pengentasan Kemiskinan	Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendampingan yang handal
			KTH Mandiri yang terbentuk
			Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Pada tahun 2022, terdapat penyesuaian arsitektur kinerja Kementerian LHK sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Dengan adanya perubahan arsitektur kinerja, berdasarkan dokumen Revisi Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024, terdapat beberapa pemutakhiran dan optimalisasi kinerja utama Kementerian LHK. Perubahan pada dokumen Renstra Kementerian LHK tahun 2020-2024 (Revisi) ini tetap mengacu pada peran sektor LHK dalam RPJMN 2020-2024 yang mendasar dan substantif terhadap Renstra sebelumnya.

Perubahan Indikator Kinerja pada dokumen Revisi Renstra KLHK Tahun 2020- 2024 yaitu meleburnya indikator kinerja yang terkait dengan kegiatan peningkatan penyuluhan yang meliputi: Indikator Kinerja Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan dan Indikator Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya. Pada perubahan baru, indikator kinerja yang disebutkan pada dokumen adalah “Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan”. Perubahan indikator kinerja ini disusun sebagai penyempurnaan muatan kinerja sebelumnya. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan menjadi hasil akhir yang diukur untuk melihat dampak intervensi BP2SDM pada penyuluhan melalui pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan kapasitas Penyuluh yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan. Dengan kata lain, Indikator kinerja kelembagaan kelompok masyarakat dan indikator kinerja penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya masih menjadi kinerja di Pusat Penyuluhan. Sedangkan hasil dari kegiatan tersebut menjadi ukuran kinerja BP2SDM.

Sebagai penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis Kementerian LHK dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Badan P2SDM yang menjadi kinerja Pusat Penyuluhan, maka disusunlah *Cascading* Peta Arsitektur Kinerja untuk mengetahui konsistensi antara rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian LHK serta Sasaran dan Indikator Kinerja Badan P2SDM dengan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Penyuluhan sebagaimana Gambar 2.2. berikut.



Gambar 2.2. Pohon Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024.

Dalam rangka mencapai target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN serta sejalan dengan Revisi Rencana Strategis Kementerian LHK 2020 – 2024 dan Revisi Rencana Strategis Badan P2SDM, Pusat Penyuluhan mendukung program Badan P2SDM pada Prioritas Nasional 3 (PN-3) yang dilakukan melalui program prioritas “Pengentasan Kemiskinan” melalui kegiatan “Penyuluhan dan/atau pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan” yang memiliki sasaran meningkatnya daya saing pelaku utama dan pelaku usaha menuju masyarakat yang mandiri. Kegiatan dan sasaran Pusat Penyuluhan ini telah disesuaikan dengan penyesuaian arsitektur kinerja Kementerian LHK sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Startegis Pusat Penyuluhan tahun 2020-2024 merupakan instrumen dasar kerangka kerja penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Penyuluhan selama jangka waktu satu periode 5 (lima) tahun secara terarah dan berkesinambungan guna mendukung penyelenggaraan program Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penyuluhan Tahun 2020-2024, diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Nomor SK.39/LUH/PP/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Pusat Penyuluhantahun 2020-2024. Adanya perubahan Struktur organisasi dan tata kerja pada Kementerian LHK maka dilakukan penyesuaian terhadap arsitektur kinerja Kementerian LHK sehingga Rencana Strategis tersebut direvisi berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Nomor SK.26/LUH/TU/DIK.3/9/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Nomor SK.39/LUH/PP/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Pusat Penyuluhantahun 2020-2024.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusat Penyuluhan mendukung 1 (satu) Kegiatan Utama yang ada di Badan P2SDM dengan penjabaran selanjutnya pada 3 Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai Pusat Penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Penyuluhan dan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.



Kegiatan pada Pusat Penyuluhan di Tahun 2023 memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu :

1. Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal);
2. Jumlah KTH (KTH Mandiri); dan
3. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan.

Adapun target kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan merupakan target yang akan dicapai oleh Pusat Penyuluhan hingga tahun 2024. Dengan adanya perubahan arsitektur kinerja, rincian besaran target Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 juga mengalami penyesuaian. Rincian target Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan sebagaimana hasil penyesuaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Target Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2020 – 2024.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5444 - Peningkatan Penyuluhan	Meningkatkan kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	460 Orang	1.030 Orang	1.700 Orang	14.405 Orang	14.405 Orang
		Jumlah KTH (KTH Mandiri)	110 Unit	65 Unit	90 Unit	617 Unit	618 Unit
	Meningkatkan kapasitas penyuluh	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	10 Unit	38 Unit	50 Unit	426 Unit	426 Unit

2.2. RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN TA. 2023

Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan pada awal Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 16.678.125.000,- yang tertuang pada Surat Pengesahan DIPA Tahun 2023 Satuan Kerja Kantor Pusat Badan P2SDM Nomor : SP DIPA- 029.08.1.465019/2023 tanggal 30 November 2022. Pusat Penyuluhan dalam DIPA Tahun 2023 memiliki posisi sebagai Sub Satker yang anggaran kegiatannya menempel pada Kantor Pusat BP2SDM. Adapun DIPA Kantor Pusat Badan P2SDM meliputi anggaran kegiatan pada Sekretariat Badan P2SDM, Pusat Penyuluhan dan Pusat Perencanaan Pengembangan SDM LHK.

Pada tahun berjalan terdapat pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada semua K/L termasuk Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan melalui mekanisme pencantuman blokir anggaran atau catatan halaman IV DIPA. Pagu yang telah terblokir tersebut, kemudian direalokasi oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-958/MK.02/2023 perihal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2023 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dalam rangka mengantisipasi kebutuhan prioritas dan mendesak di akhir tahun 2023. Sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2023, Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan menjadi Rp. 16.644.060.000,-. Adanya perubahan pagu anggaran tersebut, tidak berpengaruh terhadap penurunan target IKK Pusat Penyuluhan sebagaimana dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Target Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PAGU (RP)
1	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	Orang	1.000	2.499.607.000
2	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	Unit	30	793.000.000
3	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	Unit	20	680.500.000

Alokasi Pagu Anggaran TA. 2023

Dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan Peningkatan Penyuluhan dan Dukungan Manajemen Satker pada Pusat Penyuluhan Badan P2SDM, alokasi pagu anggaran per kegiatan pada awal TA. 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.3. di bawah ini.

Pagu Anggaran Awal TA. 2023

Rp. 16.678.125.000,-

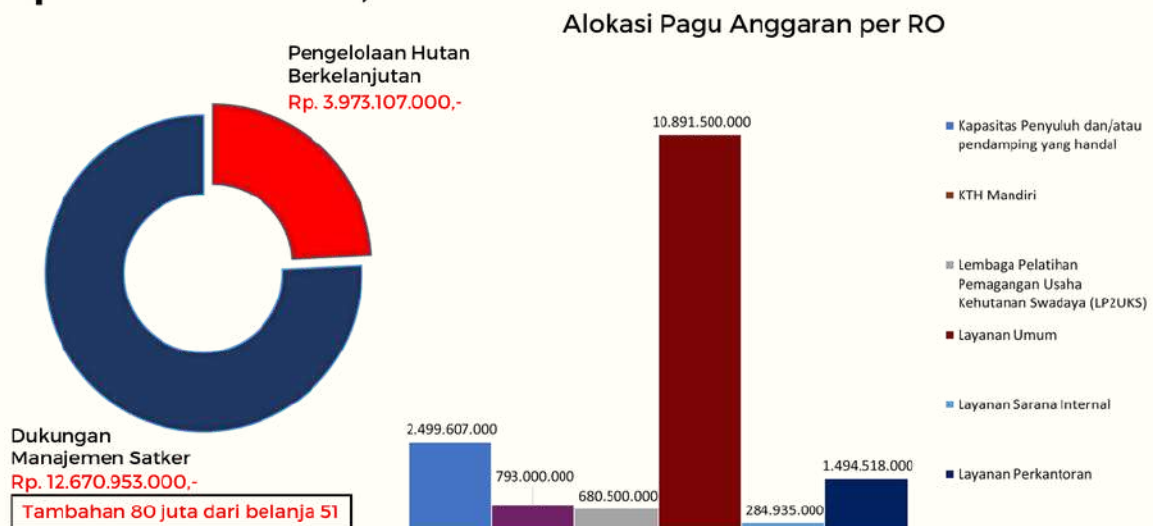


Gambar 2.3. Alokasi Pagu Anggaran Awal TA. 2023

Pada bulan Oktober, pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) yang telah terblokir, direalokasi oleh Kementerian Keuangan ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Kemudian pada bulan November 2023, terdapat revisi belanja pegawai operasional pada Unit Eselon I Badan P2SDM yang menambah anggaran pada belanja barang layanan perkantoran Pusat Penyuluhan sebesar Rp. 80.000.000,-, sehingga pagu anggaran Pusat Penyuluhan pada akhir TA. 2023 dapat dilihat sebagaimana Gambar 2.4. di bawah ini.

Pagu Anggaran Akhir TA. 2023

Rp. 16.644.060.000,-



Gambar 2.4. Alokasi Pagu Anggaran Akhir TA. 2023

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Pusat Penyuluhan Tahun 2023 dilakukan melalui pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Untuk menguatkan pencapaian kinerja tersebut, ditetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kerja antara Pimpinan Organisasi, yang dalam hal ini adalah Kepala Badan P2SDM dengan Kepala Satker di bawahnya, yaitu Kepala Pusat Penyuluhan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan IKK beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja tahun 2023 antara Kepala Badan P2SDM dengan Kepala Pusat Penyuluhan ditandatangani pada bulan Desember 2022 yang memuat target pencapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sebagaimana dijelaskan secara lebih rinci pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2023
1	Meningkatkan kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	Orang	1.000
		Jumlah KTH (KTH Mandiri)	Unit	30
2	Meningkatkan kapasitas penyuluh	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	Unit	20

Pagu awal : Rp. 16.678.125.000,-

Pagu akhir : Rp. 16.644.060.000,-



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN

Rencana Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan merupakan rencana kinerja anggaran yang sama pada lingkup Kantor Pusat Badan P2SDM dalam mendukung kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Peningkatan Penyuluhan, dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sebesar Rp 45.415.099.000,00. Sepanjang Tahun Anggaran 2023 terdapat kebijakan *refocussing* ditergetkan pada sumber dan rupiah murni pada belanja pegawai dan belanja barang.

Selain itu terdapat 3 kali Penambahan pagu sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Denda Administratif Bidang Kehutanan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengamanan Hutan Tahun 2023, Pergeseran anggaran sumber dana Rupiah Murni antar Satuan Kerja pada Kantor Pusat Badan P2SDM antar Kantor Wilayah DJPb lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan KHDTK dan Penyusunan Target PNBP Tahun 2025 dan Penambahan anggaran belanja pegawai berupa pergeseran anggaran antar Eselon 1 untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai Badan P2SDM TA 2023.

Pada akhir tahun anggaran 2023 pagu anggaran Kantor pusat Badan P2SDM sebesar Rp 48.075.063.000,- sehingga terdapat kenaikan anggaran sebesar 5,53 persen dari pagu awal. Perubahan pada anggaran Kantor Pusat Badan P2SDM tidak mempengaruhi target kinerja pada Pusat Penyuluhan. Perincian perubahan anggaran tersebut disajikan sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1. Perubahan anggaran lingkup Kantor Pusat Badan P2SDM Tahun 2023.

Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Keterangan
45.415.099.000	46.415.099.000	Penambahan pagu sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Denda Administratif bidang Kehutanan sebesar Rp. 1.000.000.000,-
45.415.099.000	45.972.332.000	Realokasi Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp. 442.767.000,- dan Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.
45.972.332.000	46.047.332.000	Penambahan pagu sumber dana RM yang berasal dari Pusat Diklat SDM LHK sebesar Rp. 75.000.000,-
46.047.332.000	46.177.332.000	Penambahan pagu sumber dana RM yang berasal dari BPLHK Bogor sebesar Rp. 130.000.000,-
46.177.332.000	47.075.063.000	Realokasi Anggaran yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment (AA) Non Belanja Pegawai sebesar Rp. 308.371.000,- dan penambahan sebesar Rp. 1.206.102.000,- berupa penyesuaian Belanja Pegawai antar Satker lingkup Badan P2SDM
47.075.063.000	48.075.063.000	Penambahan anggaran belanja pegawai berupa pergeseran anggaran antar Eselon 1 untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai Badan P2SDM TA. 2023 sebesar Rp. 1.000.000.000,-

3.2. Reviu atas Hasil Evaluasi SAKIP Pusat Penyuluhan Badan P2SDM

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Evaluasi terhadap SAKIP dilaksanakan setiap tahun guna menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas outcome program terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya *good governance* yang berorientasi hasil. Dalam peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 tahun 2021, komponen yang diukur dalam evaluasi SAKIP meliputi Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%).

Sebagaimana hasil rekomendasi evaluasi SAKIP pada tahun sebelumnya, Pusat Penyuluhan sebagai unit eselon II pada Badan P2SDM diwajibkan untuk melaksanakan penilaian SAKIP mandiri. Berdasarkan surat Kepala Badan P2SDM Nomor S.147/P2SDM/SET.11/REN.2/9/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Hasil Penjaminan Mutu Penilaian Mandiri SAKIP Satker Lingkup Badan P2SDM Tahun 2023, hasil penjaminan mutu evaluasi SAKIP mandiri yang telah dilakukan oleh Pusat Penyuluhan mendapat penilaian sebagaimana pada tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2. Hasil Penilaian SAKIP Mandiri Pusat Penyuluhan Tahun 2023

Komponen Nilai	Bobot	Nilai	Persen terhadap Bobot	Selisih Nilai dengan Bobot
Perencanaan Kinerja	30	26,08	86,93 %	3,92
Pengukuran Kinerja	30	23,80	79,33 %	6,20
Pelaporan Kinerja	15	11,20	74,67 %	3,80
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,95	79,80 %	5,05
Nilai Hasil Evaluasi	1000	81,03	81,03 %	18,97
Tingkat Akuntabilitas	AA	A		

Dari hasil penilaian SAKIP mandiri tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh Pusat Penyuluhan untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun selanjutnya. Adapun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Pusat Penyuluhan sebagaimana tabel 3.3. berikut

Tabel 3.3. Rekomendasi dan Tindaklanjut Hasil Penilaian SAKIP Mandiri Pusat Penyuluhan Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Satker agar lebih memahami aturan penyusunan dokumen perencanaan. Mencantumkan Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output yang sesuai	Penyusunan dokumen perencanaan telah sesuai aturan penyusunan dengan mencantumkan IKK dan RO yang sesuai dengan Renja Badan P2SDM dan Renja KLHK
2	Satuan kerja agar menyusun pohon kinerja/cascading untuk dicantumkan di dalam dokumen perencanaan	Pada Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023 telah mencantumkan Cascading Peta Arsitektur Badan P2SDM Tahun 2020-2024.
3	Satuan kerja agar melengkapi dokumen perencanaannya dengan tanda tangan kepala satker, tanggal pengesahan dan mengupload pada website satker.	Dokumen Perencanaan Pusat Penyuluhan telah dilengkapi dengan tanda tangan Kepala Pusat dan di upload pada website Pusat Penyuluhan (www.pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id)
4	Satker agar membuat nota dinas ataupun notulen/catatan terkait perubahan aktivitas kegiatan maupun pergeseran anggaran untuk optimalisasi kinerja	Pusat Penyuluhan telah bersurat kepada Sekretariat Badan P2SDM terkait usulan perubahan/revisi kegiatan dan pergeseran anggaran.
5	Satker agar melengkapi tanggal pada halaman Kata Pengantar laporan Kinerja dan menyampaikan surat Laporan Kinerja kepada Kepala Badan P2SDM	Pusat Penyuluhan telah melengkapi tanggal pada halaman kata pengantar Laporan Kinerja Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Tahun 2023 serta telah menyampaikan ND pengantar penyampaian Laporan Kinerja kepada Kepala Badan P2SDM
6	Satker agar lebih memahami standar penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri LHK Nomor 975 Tahun 2023	Laporan Kinerja Tahun 2023 yang disusun Pusat Penyuluhan sudah disesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK Nomor 975 Tahun 2023
7	Agar membuat benchmarking dengan satker yang memiliki tugas dan fungsi yang sama	Sekretariat Badan P2SDM telah menginisiasi untuk membuat benchmarking dengan Kementerian Pertanian, namun pada Pusat Penyuluhan Pertanian belum memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Pusat Penyuluhan KLHK.
8	Satker agar membuat pertemuan/diskusi terkait verifikasi evaluasi SAKIP mandiri dan peningkatan kapasitas SDM terkait SAKIP secara periodik. (operator diikutsertakan dalam kegiatan Bimtek SAKIP). Menuangkan tindak lanjut hasil rekomendasi evaluasi SAKIP pada Laporan Kinerja Satker.	Sebagai tindak lanjut, melalui surat undangan Kepala Pusat Penyuluhan Nomor UN. 204/LUH/TU/REN.2/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Undangan, Pusat Penyuluhan telah melaksanakan pertemuan membahas evaluasi hasil penjaminan mutu penilaian mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Tahun 2023

3.3. METODE PENGUKURAN

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Pengukuran dilakukan terhadap empat metode yaitu presentase capaian kinerja, progress terhadap pelaksanaan Renstra, efektivitas kinerja dan efisiensi kinerja. Adapun perhitungan menggunakan formula sebagaimana Gambar 3.1. berikut.



Gambar 3.1. Metode Pengukuran Kinerja

3.4. HASIL PENGUKURAN KINERJA

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakikatnya merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023 dengan realisasi pada tahun tersebut. Adapun hasil pengukuran kinerja Pusat Penyuluhan adalah sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja 2023	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	Orang	1.000	1.000	100%
		Jumlah KTH (KTH Mandiri)	Unit	30	30	100%
2	Meningkatkan kapasitas penyuluh	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	Unit	20	20	100%
Rata-Rata Capaian						100%

Berdasarkan perhitungan Tabel 3.4., nilai rata-rata capaian kinerja Pusat Penyuluhan pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Nilai rata-rata capaian ini menunjukkan bahwa seluruh target kinerja Pusat Penyuluhan pada tahun 2023 telah tercapai.

Dalam mencapai target kinerja, Pusat Penyuluhan memanfaatkan anggaran yang dibebankan kepada DIPA Satker Kantor Pusat Badan P2SDM sebagaimana tertuang pada Surat Pengesahan DIPA Tahun 2023 Satuan Kerja Kantor Pusat Badan P2SDM Nomor : SP DIPA-029.08.1.465019/2023 tanggal 30 November 2022. Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2023 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II sebesar Rp.16.678.125.000,- yang selanjutnya menjadi Rp. 16.644.060.000 di akhir tahun anggaran. Realisasi anggaran tahun 2023 tercapai sebesar Rp. 16.641.306.997,- atau 99,98%.



EFEKTIVITAS KINERJA

Rasio efektivitas capaian kinerja diukur dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun berjalan dengan persentase capaian kinerja tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan > 1 , maka pencapaian kinerja sasaran kegiatan termasuk ke dalam kategori efektif, sedangkan bila rasio yang dihasilkan adalah < 1 , menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sasaran kegiatan kurang efektif. Hasil perhitungan terhadap efektivitas capaian kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Efektivitas Capaian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	TA. 2022			TA. 2023			Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	1.700	1.700	100	1.000	1.000	100	1,00
2	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	90	90	100	30	30	100	1,00
3	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	50	50	100	20	20	100	1,00
Rata-Rata Efektivitas								1,00

Rasio efektivitas capaian kinerja untuk IKK 1, IKK 2 dan IKK 3 menunjukkan hasil > 1 atau dapat dikatakan pencapaian kinerja Pusat Penyuluhan pada tahun 2023 telah efektif. Berdasarkan perhitungan Tabel 3.5. diketahui bahwa rata-rata efektivitas capaian kinerja Pusat Penyuluhan sebesar 1 yang artinya pencapaian kinerja telah dilakukan dengan efektif.

EFISIENSI KINERJA

Efisiensi Capaian Kinerja tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara persentase penyerapan anggaran tahun 2023 dengan persentase capaian kinerja tahun 2023. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi capaian kinerja, apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian kinerja termasuk dalam kategori efisien, sedangkan bila rasio yang dihasilkan < 1 maka pencapaian kinerja dikategorikan kurang efisien. Hasil perhitungan terhadap efisiensi capaian kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana Tabel 3.6. di bawah ini :

Tabel 3.6. Efisiensi Capaian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian		Efisiensi Capaian Kinerja
			Keuangan	Kinerja	
1	Meningkatkan kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	99,97	100	1,00
		Jumlah KTH (KTH Mandiri)	99,95	100	1,00
2	Meningkatkan kapasitas penyuluh	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	99,98	100	1,00
Rata-Rata Capaian					1,00

Berdasarkan Tabel 3.7. rata-rata efisiensi capaian kinerja Pusat Penyuluhan memperoleh nilai 1,00. Hal ini dapat dikatakan bahwa memanfaatkan sumberdaya anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

PROGRES CAPAIAN RENSTRA

Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata progres capaian Renstra Pusat Penyuluhan s.d Tahun 2023 sebesar 15,11%. Secara rinci progres capaian Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 3.7. berikut:

Tabel 3.7. Progres Capaian s.d. Tahun 2023 terhadap Renstra Tahun 2020-2024.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra 2020-2024	Capaian Renstra				Realisasi Capaian Renstra s.d. 2023	% Progress Renstra
			2020	2021	2022	2023		
1	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)	32.000	460	1.288	1.700	1.000	4.448	13,90
2	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	1.500	100	65	90	30	285	19,00
3	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	950	10	38	50	20	118	12,42
Rata-rata Progres								15,11%

Pada progres capaian Renstra Pusat Penyuluhan sampai dengan tahun 2023, masih terdapat Indikator kinerja dengan capaian rendah yaitu di bawah 30%, hal ini disebabkan karena masih rendahnya alokasi anggaran untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan serta terdapat *refocussing* anggaran untuk menanggulangi pandemi covid-19. Beberapa upaya yang akan dilaksanakan Pusat Penyuluhan pada tahun 2024 untuk meminimalisir Gap yang terjadi diantaranya:

1. Melakukan perhitungan kembali terhadap pencapaian target yang realistis.
2. Melakukan evaluasi terhadap metode dalam pencapaian target dan menentukan metode yang efektif dan mungkin dilakukan untuk meminimalisir Gap.
3. Melakukan revisi target capaian Renstra Tahun 2020-2024 yang dilakukan pada tahun 2024.
4. Melakukan revisi Kertas Kerja RKA-K/L sesuai hasil evaluasi.

3.5. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal)

Indikator Kinerja 1

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH) Pusat Penyuluhan BP2SDM pada akhir tahun 2023, jumlah Penyuluh Kehutanan PNS sebesar 2.983 orang yang terdiri dari 2.530 orang tersebar di 33 Pemerintah Daerah Provinsi dan sebanyak 453 orang tersebar di Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan jumlah Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) sebanyak 5.828 orang yang tersebar di 34 provinsi dan jumlah Penyuluh Kehutanan Swasta sebanyak 651 orang yang berada di perusahaan pada sektor bidang kehutanan.

Pendampingan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan memerlukan sumberdaya manusia Penyuluh Kehutanan yang memiliki kompetensi di tingkat lapangan untuk dapat hadir di tengah masyarakat. Guna menyiapkan Penyuluh Kehutanan sebagai pendamping yang handal, diperlukan kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal bagi kelompok masyarakat melalui penyelenggaraan temu teknis dan berbagai kegiatan pembinaan teknis terutama dalam hal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kewirausahaan/*entrepreneurship* maupun pengembangan usaha kelompok yang didampingi.

Strategi peningkatan kompetensi kewirausahaan KTH, harus diawali dengan transformasi pola pikir dan peningkatan kompetensi penyuluh dalam pendampingan kewirausahaan. Sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dibutuhkan metode pembelajaran/peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan yang berbeda dari biasanya (*business as usual*).

Pada Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023, Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu sebanyak 1.000 orang. Dalam mencapai target tersebut, maka dilakukan beberapa kegiatan dalam bentuk Temu Teknis Penyuluh Kehutanan PNS dan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) serta Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Swasta berdasarkan komoditas unggulan bidang kehutanan yang dilaksanakan baik melalui dalam jaringan maupun secara langsung tatap muka.

Capaian kinerja untuk IKK 1 yaitu Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (Penyuluh Handal) sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu 1.000 orang penyuluh dan/atau pendamping handal yang ditingkatkan kapasitasnya atau telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Anggaran yang dialokasikan untuk IKK 1 pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.499.607.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.498.967.400,- atau 99,97%, secara lebih jelas sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8. berikut :

Tabel 3.8. Rincian Pencapaian Kinerja Jumlah Penyuluh dan/atau Pendamping Handal.

No	Kegiatan Temu Teknis	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	Webinar Kewirausahaan Komoditas Kehutanan	8 Maret 2023	607 orang
2	Temu Teknis Kewirausahaan PKSM	9 s.d. 11 Mei 2023	30 orang
3	Temu Teknis Online Komoditas Bambu	23 s.d. 25 Mei 2023	50 orang
4	Temu Teknis Kewirausahaan Komoditas Bambu	6 s.d. 8 Juni 2023	30 orang
5	Temu Teknis Online Komoditas Wisata Alam	1 s.d. 3 Agustus 2023	40 orang
6	Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Swasta	26 s.d. 27 September 2023	213 orang
7	Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Komoditas Wisata Alam	17 s.d. 19 Oktober 2023	30 orang
Jumlah			1.000 orang

Efisiensi capaian kinerja Jumlah penyuluh dan/atau pendamping handal termasuk dalam kategori efisien karena perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan pelaksanaan penyerapan anggaran tahun 2023 memiliki rasio > 1 . Demikian halnya dengan efektivitas kinerjanya menunjukkan rasio 1 yang berarti kegiatan ini telah dilaksanakan secara efektif, dimana persentase capaian kinerja tahun 2022 sama dengan persentase capaian tahun 2023 yaitu 100% dari target.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian IKK Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal, pelaksanaan kegiatan Temu Teknis ini baik untuk Penyuluh Kehutanan Aparatur (PK PNS) maupun Penyuluh Kehutanan Non Aparatur (PKSM) memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan terutama dalam pengetahuan dan informasi teknologi terkait komoditas unggulan yang sedang diusahakan oleh kelompok tani. Kesesuaian materi Temu Teknis Berbasis Komoditas dengan kebutuhan peserta rata-rata 89,12 % menyatakan sangat baik dan menyatakan baik dan 10,88 % cukup. Data ini menunjukkan bahwa kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta adalah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan Penyuluh Kehutanan saat ini



Permasalahan dari kegiatan peningkatan kapasitas secara virtual rata-rata peserta mengalami kendala sinyal jaringan di tempat kerja atau tempat tinggal kurang mendukung. Peserta banyak kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Peran dinas, CDK maupun KPH dan UPT KLHK dalam memberikan fasilitasi terhadap kegiatan Temu Teknis ini sangat diperlukan agar Penyuluh Kehutanan dapat mengikuti kegiatan Temu Teknis ini dengan lancar. Sedangkan pelaksanaan kegiatan Temu Teknis Penyuluh Kehutanan dengan metode tatap muka secara langsung dilaksanakan pada Temu Teknis PK PNS Wisata Alam dan Temu Teknis Komoditas Bambu, kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah materi pembelajaran yang sangat padat, hal ini dilakukan dikarenakan waktu kegiatan Temu Teknis yang hanya 3 hari, sehingga materi yang disampaikan oleh narasumber menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Tetapi secara umum kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar sesuai yang sudah direncanakan.



Selain kegiatan peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan yang terkait langsung dengan capaian IKK, Pusat Penyuluhan juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan dengan output kegiatan di luar capaian IKK, antara lain :

- Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik. Penyebarluasan informasi melalui media cetak dalam bentuk penyusunan poster. Sedangkan untuk media elektronik yaitu melalui media sosial Pusat Penyuluhan, website Pusat Penyuluhan dan aplikasi tematik, diantaranya SIMLUH, Cyber Extension, Forestamart, dan aplikasi Wana Lestari. Selain itu, pada tahun 2023 Pusat Penyuluhan juga melaksanakan kegiatan virtual yang meliputi Podcast Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Talkshow Pusat Penyuluhan yang dapat diakses pada kanal Youtube PUSLUH KLHK,



- Penilaian dan Pemberian Penghargaan Wana Lestari, yaitu menetapkan perorangan, kelompok atau aparaturnya pemerintah yang berprestasi dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang LHK melalui mekanisme penilaian berjenjang dari UPT-Provinsi-Nasional dengan kriteria yang telah ditentukan. Sebanyak 48 orang Pemenang Lomba dan Penerima Apresiasi Wana Lestari Tahun 2023 menerima penghargaan dari Menteri LHK Siti Nurbaya. Penyerahan penghargaan dilakukan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti pada tanggal 15 Agustus 2023. Lomba Wana Lestari diselenggarakan sebagai suatu metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menilai prestasi perorangan, kelompok atau aparaturnya pemerintah dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan Apresiasi Wana Lestari merupakan penilaian prestasi yang dicapai berdasarkan inisiatif dan partisipasi dalam pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

”
Saya mengajak para teladan dan seluruh
rimbawan, baik di Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
pemerintah daerah dan masyarakat,
termasuk dunia usaha untuk kita terus
bersama-sama memberikan kontribusi
pemikiran dan aksi nyata di lapangan
dalam pelaksanaan pembangunan
lingkungan hidup dan kehutanan.

Siti Nurbaya
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

”



- Penerbitan Majalah Kenari. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media informasi bagi penyuluh kehutanan dalam melaksanakan penyuluhan di lapangan dengan tujuan memudahkan Penyuluh Kehutanan/Pendamping dalam mengakses bahan materi penyuluhan dan menyediakan sarana bagi Penyuluh Kehutanan untuk menuangkan ide/tulisan.



Success Story

PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH

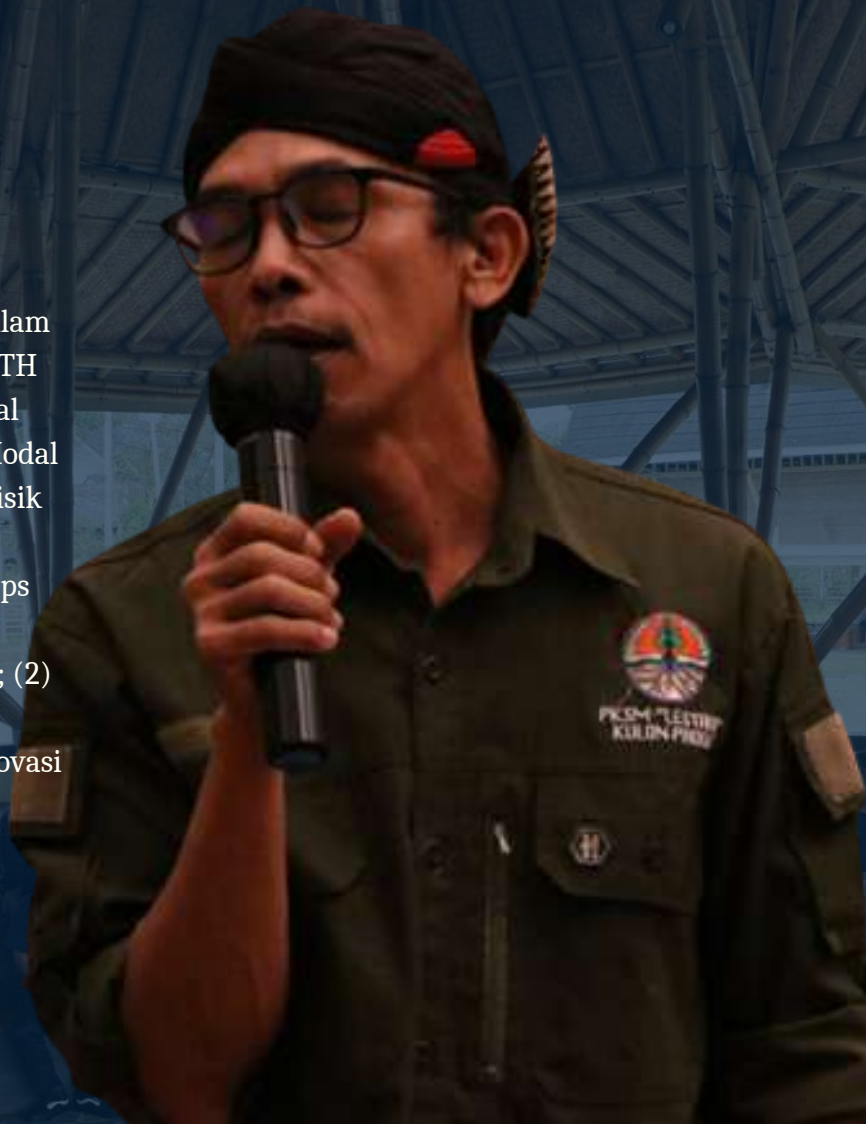
Peserta memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap penyelenggaraan kegiatan yang sudah dilaksanakan, karena harapan peserta untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan secara offline atau tatap muka bisa terlaksana. Lidya Ernawaty, S.Hut merupakan salah satu peserta yang berasal dari Magelang. Beliau merupakan Penyuluh Kehutanan pendamping KTH Panca Kriya Prajeksari. Pada sharing ini Lidya menjelaskan bahwa KTH Panca Kriya Prajeksari sudah melakukan pengelolaan bambu dengan menggunakan teknik laminasi dan koiling. Awalnya KTH ini merupakan KTH yang usahanya bergerak dalam membuat sangkar burung. Pada tahun 2008 – 2017 KTH mulai melakukan inovasi produk dari sangkar burung ke berbagai macam produk (anyaman, koiling, laminasi), mengikuti pelatihan produk dll. Produk yang dihasilkan oleh KTH ini sampai sekarang sudah menembus pasar luar negeri dengan berbagai produk dari koiling dan laminasi.

Materi dan narasumber yang dihadirkan juga memiliki kompetensi di bidang pengelolaan komoditi yang menjadi tema Temu Teknis, seperti perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wisata oleh kelompok/masyarakat. Materi pengelolaan wisata alam juga disampaikan oleh Ary Suhandi, beliau merupakan Direktur INDECON yang sudah puluhan tahun melakukan pendampingan dalam pengelolaan wisata alam. Beliau memberikan motivasi dan semangat kepada peserta serta tips dan trik dalam mengelola wisata alam baik yang baru akan memulai bahkan yang sudah mengelola wisata alam.

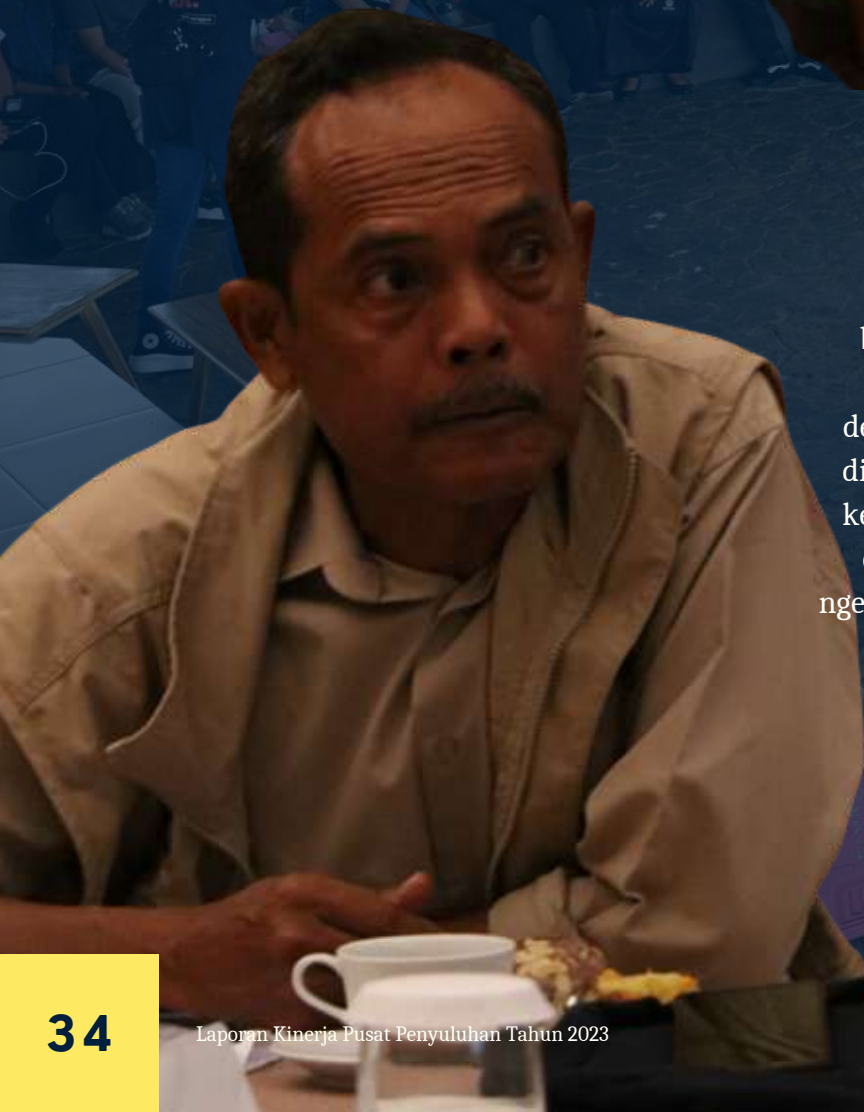


Sumarjana, PKSM/ Ketua KTH

Sembodo/Pengelola Wisata Alam Kalibiru, Kulonprogo, DI Yogyakarta membagikan pengalamannya dalam mengelola Wisata Alam Kalibiru. Modal yang harus dimiliki oleh KTH untuk mengembangkan usahanya (1) Modal Sumber daya Alam; (2) Modal Sosial; (3) Modal Sumber daya Manusia (SDM); (4) Modal Fisik dan (5) Modal Finansial. Berdasarkan pengalamannya Sumarjana membagikan tips untuk penguatan kelembagaan usaha KTH yaitu: (1) pembagian kepengurusan harian; (2) kerja sama dan berbagi informasi; (3) pembukuan usaha; dan (4) kualitas dan inovasi



Mashadi PKSM dari Brebes, Jawa Tengah sebagai Sekretaris dan Pengelola KMPHP Mangrove Sari. Menurut pengalamannya bergelut dalam pengelolaan Kelompok Tani Hutan Mangrove, pemberian peran sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya harus diperhatikan dalam penguatan kelembagaan kelompok. Jangan sampai terjadi “sing ngerti ora bisa, sing bisa ora kuasa, sing kuasa ora ngerti” (yang faham tidak bisa, yang bisa tidak berkuasa, yang berkuasa tidak faham)





Aris Munandar, PKSM Rembang Jawa Tengah, Owner Surya Jamur, berdasarkan pengalamannya sebagai wirausaha, moto yang perlu dipegang oleh PKSM menuju Eco-sociopreneur adalah: “Sukses atau Gagal dalam sebuah usaha adalah hal yang biasa, yang diperlukan dalam usaha adalah semangat dan gembira. Untuk menentukan ide usaha, dapat berawal dari hobi, pengalaman, potensi dan pasar”.



Di setiap akhir kegiatan peserta diberikan waktu untuk melakukan diskusi terkait pengelolaan komoditas yang menjadi tema Temu Teknis, seperti wisata alam pada Kawasan Konservasi, Areal Izin Perhutanan Sosial dan Hutan Rakyat. Diskusi yang dilakukan ini untuk mengangkat semua permasalahan dan kendala serta rencana tindak lanjut yang akan diterapkan peserta di wilayah binaan masing-masing dalam



pengelolaan wisata alam agar bisa lebih maju sehingga kelompok dan masyarakat bisa merasakan manfaat dari alam yang mereka jaga selama ini. Konsep wisata berkelanjutan selalu disampaikan kepada para peserta agar pengelolaan Kawasan hutan untuk wisata bisa terus berjalan tanpa harus merusak ekosistem yang ada sehingga dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi hutan dan manusia.

Success Story

PENDAMPINGAN
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)
OLEH PENYULUH KEHUTANAN
SEBAGAI DAMPAK TEMU TEKNIS
KEWIRAUSAHAAN BAMBU
TAHUN 2023



Peningkatan kapasitas masyarakat dan Kelompok Tani Hutan (KTH) menjadi fokus utama melalui upaya penyuluhan kehutanan. Peran strategis penyuluh kehutanan seperti Ibu Tuhu Suprapti, S.Hut telah menunjukkan dampak positif melalui pendampingan yang dilakukan setelah mengikuti Temu Teknis Kewirausahaan Bambu tahun 2023.



Peran penyuluh kehutanan tidak hanya terbatas pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga pada perubahan sikap positif masyarakat terhadap pembangunan kehutanan. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan maka Pusat Penyuluhan menyelenggarakan Temu Teknis Kewirausahaan Bambu pada tanggal 6-8 Juni 2023 di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Materi yang diajarkan melibatkan integrasi bisnis bambu, praktek pengolahan bambu, dan berbagi pengalaman antarpenyuluh. Ibu Tuhu, seorang penyuluh kehutanan yang berpengalaman, ikut serta dalam kegiatan ini.



Jumlah KTH (KTH Mandiri)

Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah KTH (KTH Mandiri) merujuk pada banyaknya KTH yang difasilitasi oleh Pusat Penyuluhan melalui pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) mempunyai klasifikasi yang terdiri dari kelas Pemula, kelas Madya dan kelas Utama. Klasifikasi KTH digunakan sebagai dasar pembinaan untuk peningkatan kemampuan dan kemandirian KTH.

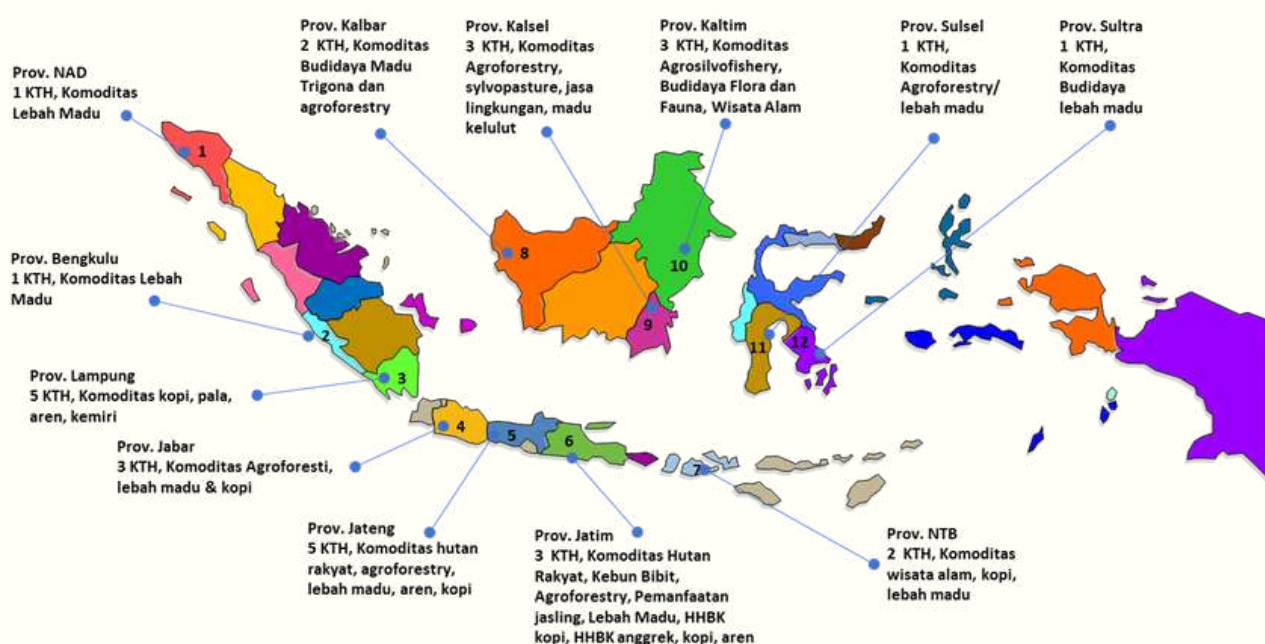
KTH Mandiri yaitu KTH yang meningkat kelasnya dari kelas Madya menjadi Utama. KTH Mandiri diukur dari kemampuan KTH dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. Tujuannya agar KTH memiliki kelembagaan yang kuat, kawasan yang tertata dan lestari, serta usaha yang berkembang, sehingga kesejahteraan anggota meningkat dan berkelanjutan.

Pendampingan pengembangan KTH menuju KTH mandiri dilakukan secara berkelanjutan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penerbitan sertifikat KTH kelas utama. Salah satu target RPJM tahun 2020-2024 Pusat Penyuluhan BP2SDM adalah meningkatkan 500 unit kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) menjadi mandiri yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Untuk mewujudkan target KTH mandiri tersebut pada tahun 2023 Pusat Penyuluhan memfasilitasi kegiatan pengembangan KTH menuju KTH Mandiri yaitu dari kelas madya ke utama sebanyak 30 KTH yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia. Anggaran fasilitasi diprioritaskan untuk kelola kelembagaan melalui pendampingan pembuatan akta notaris KTH dan Kelola usaha melalui penambahan alat ekonomi produktif/diversifikasi produk KTH serta pengembangan usaha KTH. Adapun kelola kawasan diarahkan secara swadaya kelompok. Bagi Penyuluh Kehutanan pendamping, fasilitasi KTH Mandiri akan meningkatkan kemampuan Penyuluh Pendamping dalam membina kelompok.

Mekanisme penyaluran dana Fasilitas Kegiatan Pengembangan KTH menuju KTH mandiri dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor : P.1/P2SDM/SET/KUM.1/3/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bantuan dana disalurkan melalui mekanisme Langsung (LS) kepada rekening kelompok setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan antara lain mempunyai rekening atas nama kelompok/KTH, menandatangani surat perjanjian kerjasama dan telah menandatangani kwitansi penerimaan dana. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh KTH dengan didampingi Penyuluh Kehutanan/pendamping.

Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023, KTH Mandiri menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ke 2. Target IKK 2 yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu sebanyak 30 unit KTH Mandiri dengan besaran bantuan dana tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap KTH. Target tersebut telah tercapai 100% dimana 30 KTH telah difasilitasi menjadi KTH Mandiri hingga akhir tahun 2023. Berdasarkan realisasi anggaran, capaian IKK 2 yaitu 100% dari pagu anggaran sebesar Rp.793.00.000,- .

Efisiensi capaian kinerja Jumlah KTH (KTH Mandiri) termasuk dalam kategori efisien karena perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan pelaksanaan penyerapan anggaran tahun 2022 memiliki rasio > 1. Demikian halnya dengan efektivitas kerjanya menunjukkan rasio 1 yang berarti kegiatan ini telah dilaksanakan secara efektif, dimana persentase capaian kinerja tahun 2023 sama dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022.



Gambar 3.2. Jumlah KTH Mandiri pada Setiap Provinsi dan Komoditas yang Dikembangkan.

Fasilitasi KTH Mandiri tahun 2023 ditetapkan melalui surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Nomor: SK. 01/PPK/TU/LUH/KEU.0/5/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Penerima Fasilitasi Pengembangan KTH Menuju KTH Mandiri Tahun 2023. Fasilitasi ini diberikan kepada 30 KTH yang tersebar di 12 provinsi dengan berbagai komoditas yang diusahakan yaitu: Agroforestri, lebah madu, jamur tiram, ekowisata, hutan rakyat, persemaian, kopi, cuka kayu, gula aren, jasa lingkungan dan produk HHBK lainnya.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitasi pengembangan KTH menuju KTH mandiri tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan di lapangan telah dilaksanakan dan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan panduan yang telah disediakan. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan baik secara teknis maupun administrasi. Monitoring dilaksanakan secara online pada bulan Oktober dan November 2023. Monitoring yang dilakukan secara online terhadap 30 KTH penerima fasilitasi KTH mandiri, menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Desember tahun 2023 sebanyak 30 KTH rata-rata telah melaksanakan kegiatan sebesar 100% dari keseluruhan kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan KTH menuju KTH mandiri antara lain :

- Pelaksanaan bimbingan teknis secara virtual/zoom meeting belum berjalan optimal karena terkendala oleh jaringan internet di sebagian daerah yang kurang bagus sehingga penyampaian materi bimbingan teknis kadang-kadang terganggu. Oleh karena itu diperlukan lagi konsultasi secara intensif antara KTH, Penyuluh Kehutanan Pendamping dan Pusat Penyuluhan.
- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan KTH menuju KTH Mandiri sebagian terkendala sehingga tertunda, misalnya pengurusan izin produk/PIRT karena diperlukan sosialisasi yang mengumpulkan banyak orang, lebah madu yang mengalami stress kemudian kabur karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan cocoknya kondisi 20 wilayah, pengurusan akta notaris yang memerlukan waktu yang cukup lama, dan lain-lain.
- Pengurus dan anggota KTH yang sudah berusia lanjut sehingga terkendala pada terhambatnya kegiatan yang memerlukan penguasaan teknologi misalnya pelaksanaan zoom meeting, penguasaan alat, pelaksanaan monitoring dengan metode online (google drive dan power point) dan lain-lain



Success Story

KTH MANDIRI 2023

KTH WONOSANTRI ABADI

Salah satu KTH Mandiri yang mendapatkan fasilitasi tahun 2023 yaitu KTH Wonosantri Abadi. Kelompok Tani Hutan (KTH) Wonosantri Abadi yang diketuai oleh Fatkhul Ulum, S.Pd.I atau biasa dipanggil Gus Ulum merupakan salah satu Kelompok Tani Hutan yang berlokasi di Desa Toyomarto yang masuk dalam wilayah Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Saat ini, 120 anggota KTH didampingi penyuluh kehutanan Wiwin Yuliari, SP. KTH Wonosantri Abadi memiliki produk unggulan berupa biji kopi yang bernama Kopi Lembah Arjuna, atau yang lebih dikenal dengan nama Kopi Lemar. Kopi tersebut telah beredar di masyarakat melalui kedai kopi yang ada di sekitar Malang Raya. Sampai dengan saat ini KTH Wonosantri Abadi terus berkembang dan mendapatkan beberapa legalitas usaha dan produk yang membantu dalam pemasaran, seperti ijin edar PIRT maupun produk halal.



Kegiatan yang telah dilakukan dalam fasilitasi KTH mandiri yaitu kegiatan dalam kelola kelembagaan yang dilakukan secara swadaya. Hal ini dilakukan karena KTH memiliki SDM yang berkualitas. Anggota KTH dibagi menjadi beberapa divisi. Anggota senior difokuskan dalam kegiatan budidaya, sementara anggota kaum muda/milenial fokus pada pengolahan dan pemasaran. Beberapa anggota KTH sudah memiliki sertifikat seperti sertifikasi pemandu wisata, instruktur, pengolahan buah, roaster, dan barista, serta memiliki anggota KTH yang ahli di bidang fotografi dan videografi. Pemantapan Kelola Kawasan dilakukan secara swadaya. Pemantapan Kelola usaha yaitu peningkatan kualitas usaha yaitu pengadaan grinder dan milk steamer. Penambahan sarana kualitas pasca panen berupa washer kopi dan grader kopi. Selanjutnya penambahan sarana kuantitas paska panen berupa dome jemur dan gazebo.

Nilai transaksi ekonomi dari greenbean kopi arabika volume sampai 1 ton, omzet 100.000.000 dengan pemasaran internasional. Keripik talas, ubi dan pisang sebanyak 12 ton/tahun dengan omzet 100.000.000 secara nasional. Pembibitan kopi, alpukat dan balsa secara swadaya di lahan 2000 m² dengan kapasitas produksi 20.000 bibit. Bibit dijual kepada masyarakat dengan harga murah. Untuk bibit alpukat hanya membayar biaya sambung sebesar Rp. 3000/bibit, sementara bibit kopi dijual Rp. 5.000/ bibit (pasaran harga diatas Rp.10.000/bibit karena sudah tersertifikasi).



Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan

Indikator Kinerja 3



Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) atau Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha di bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan pemagangan bagi masyarakat lainnya. Hadirnya Wanawiyata Widyakarya menjadi suatu jawaban sekaligus tantangan peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat tapak sebagai pelaku utama pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mengelola usahanya sehingga mereka mampu, berdaya dan mandiri.

Pada Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023, Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang terbentuk dan dikembangkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ke 3. Target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu 20 unit KTH yang terdiri dari pembentukan 10 unit KTH menjadi LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya dan pengembangan 10 unit KTH menjadi LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya. Target tersebut telah tercapai 100% dimana terdapat total 20 unit KTH telah difasilitasi pembentukan dan pengembangan LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya hingga akhir tahun 2022. Berdasarkan realisasi anggaran, capaian yaitu 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 680.500.000,-.



Pada capaian kinerja Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang terbentuk dan dikembangkan termasuk dalam kategori efisien karena perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan pelaksanaan penyerapan anggaran tahun 2023 memiliki rasio > 1 . Demikian halnya dengan efektivitas kerjanya menunjukkan rasio 1 yang berarti kegiatan ini telah dilaksanakan secara efektif, dimana persentase capaian kinerja pada tahun 2023 ini sama dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2021.

PEMBENTUKAN

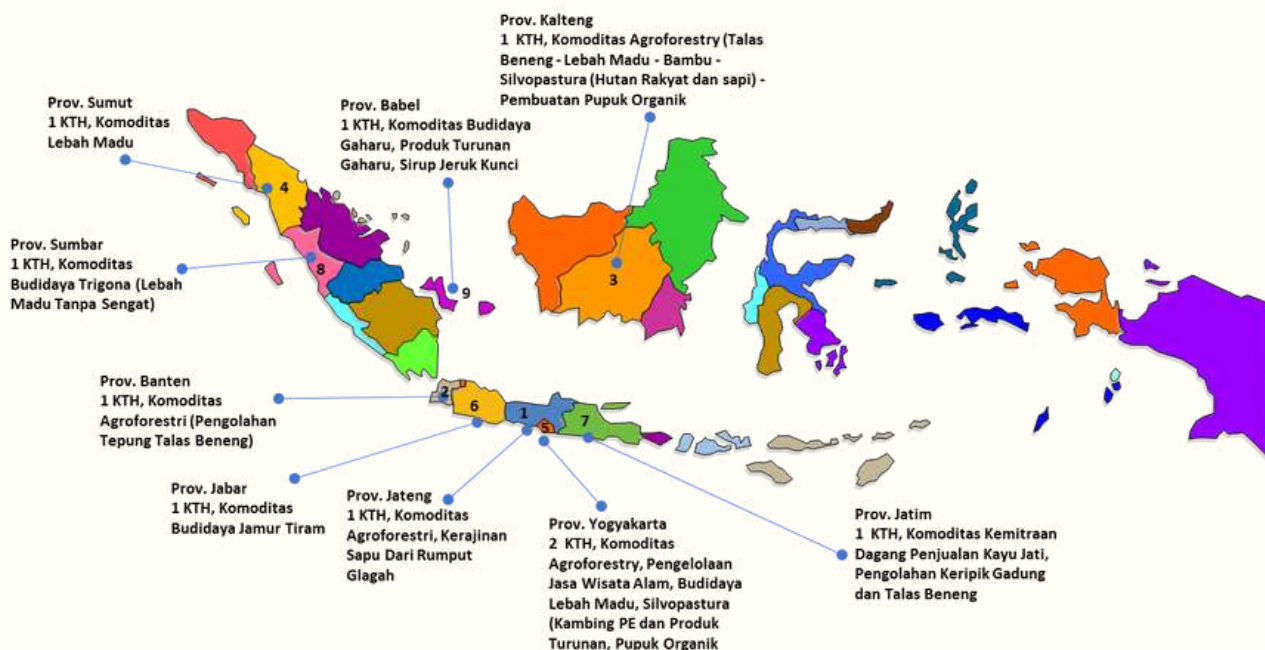
Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) atau Wanawiyata Widyakarya



Fasilitasi pembentukan LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya diberikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) yang memiliki kegiatan usaha produktif bidang kehutanan dan lingkungan hidup dan memiliki potensi untuk dapat memberikan pelatihan dan pemagangan usaha produktif yang dilakukannya kepada masyarakat atau KTH lainnya. Calon KTH yang akan difasilitasi memiliki SDM yang mampu menjadi fasilitator atau narasumber untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman usahanya serta memiliki sarana prasarana penunjang sebagai tempat pembelajaran. Pengalaman KTH sebagai lokasi studi banding maupun pelatihan bagi masyarakat menjadi nilai lebih untuk dapat menerima fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widyakarya.

Output pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2023 yaitu terbentuknya unit – unit percontohan usaha dibidang kehutanan dan ataupun lingkungan hidup yang bisa dijadikan sebagai tempat pelatihan dan pemagangan bagi masyarakat luas. Sedangkan outcomenya yaitu meningkatnya kemampuan dan keterampilan masyarakat melalui pemagangan dalam mengembangkan usaha dibidang kehutanan dan ataupun lingkungan hidup dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat yang produktif dan mandiri dibidang kehutanan dan ataupun lingkungan hidup. Pagu anggaran belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah sebesar Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) telah terealisasi sebesar 100%.

Berdasarkan hasil laporan kegiatan dan hasil monitoring kelompok penerima kegiatan Fasilitas Pembentukan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2023 yang telah dilaporkan, secara umum hasil yang dicapai telah sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah dibuat pada tahap perencanaan kegiatan sebelumnya. Realisasi fisik dan keuangan masing – masing kelompok yang dilaksanakan melalui 1 (satu) tahap pembayaran dengan dana sebesar Rp. 25.000.000 secara keseluruhan mencapai 100 %. Adapun alokasi dana yang digunakan oleh penerima fasilitas meliputi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelatihan, sarana dan prasarana pendukung pelatihan dan pemagangan, serta pengembangan usaha telah dilaksanakan oleh masing – masing wanawiyata widyakarya. Dari hasil monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitas, secara keseluruhan perkembangan 10 Wanawiyata Widyakarya kegiatan Fasilitas Pembentukan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan lancar dan sudah terlaksana 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana



Gambar 3.3. KTH penerima fasilitas pembentukan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya beserta komoditas yang diusahakannya.

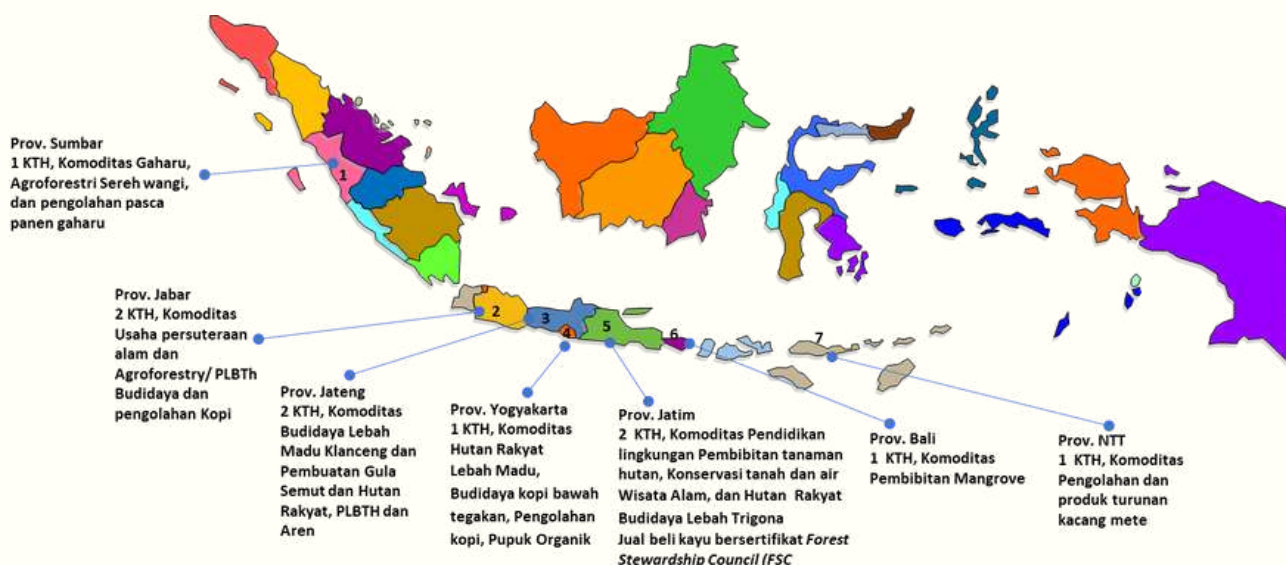


PENGEMBANGAN

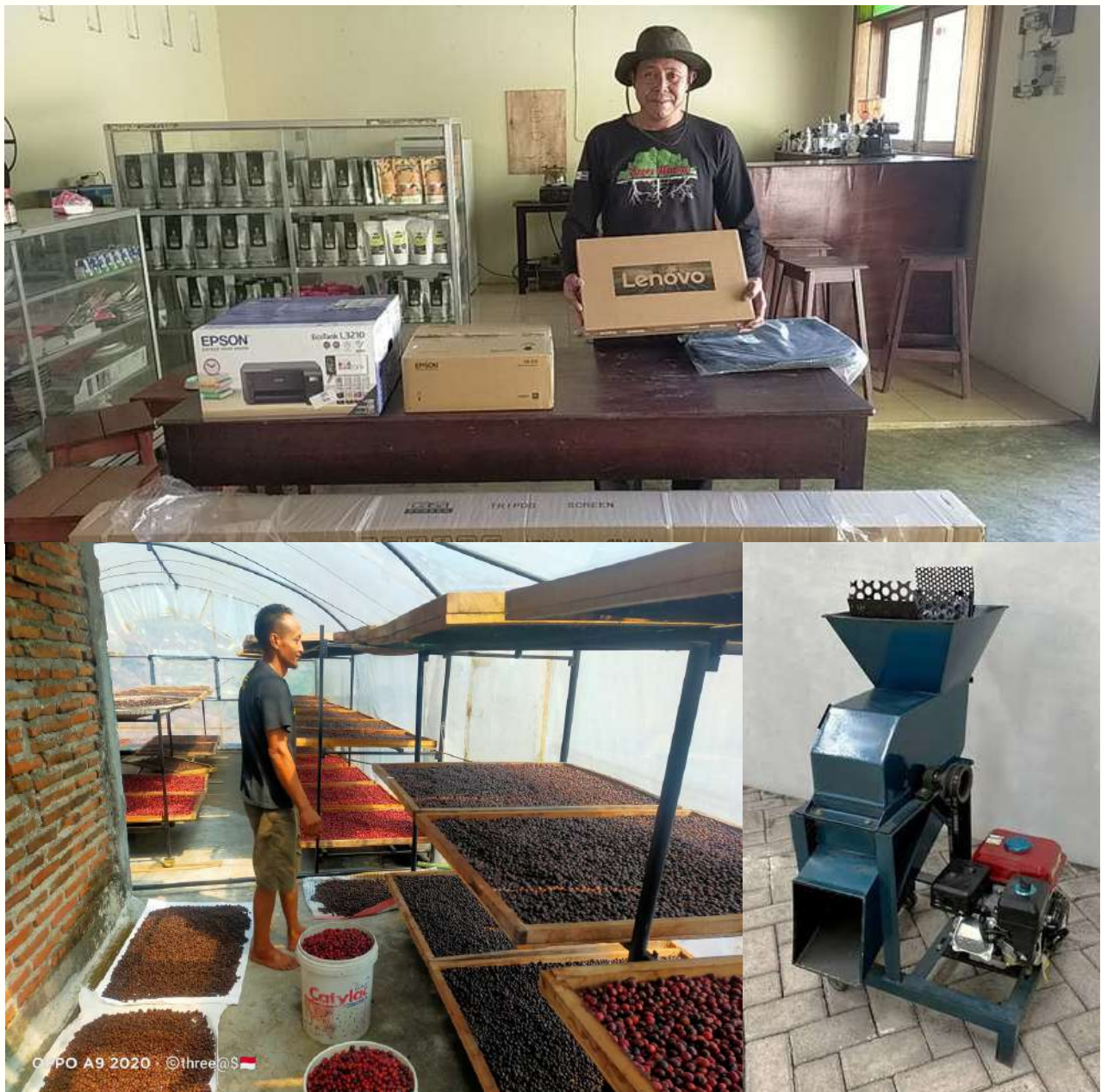
Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) atau Wanawiyata Widyakarya

Pengembangan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya dilakukan untuk mengoptimalkan pendayagunaan LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya yang telah ditetapkan agar menjadi lembaga pelatihan dan pemagangan yang mampu mengelola dan mendayagunakan sumber daya pelatihan secara optimal dengan menerapkan program pelatihan yang berbasis kompetensi, memiliki sarana dan prasarana yang terstandar, serta memiliki fasilitator atau instruktur yang kompeten. Kriteria penerima fasilitasi pengembangan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya adalah telah ditetapkan sebagai wanawiyata widyakarya dan memiliki komoditas usaha atau rencana pengembangan usaha berdasarkan prioritas kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau kebijakan lain prioritas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengembangan LP2UKS/ Wanawiyata Widyakarya meliputi kegiatan pengembangan usaha, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelatihan dan pemagangan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola Wanawiyata Widyakarya.

Pada tahun 2023 target pengembangan LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya dilakukan terhadap 10 KTH yang telah ditetapkan menjadi LP2UKS/Wanawiyata Widyakarya. Target tersebut tercapai 100% dengan dilaksanakannya pengembangan terhadap 10 Wanawiyata Widyakarya yang tersebar di 14 Provinsi. Provinsi penerima fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Bali, NTB dan NTT. Fasilitasi pengembangan wanawiyata widyakarya ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Sub Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Nomor: SK.03/PPK/TU/LUH/ KEU.0/5/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Penerima Fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2023.



Gambar 3.4. KTH penerima fasilitasi pengembangann LP2UKS/Wanawiyata beserta komoditas yang diusahakannya.



Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Fasilitas Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2022, lebih difokuskan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian target kegiatan fasilitasi sesuai dengan rencana dan tata waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu :

- Penelitian/verifikasi berkas dengan menelusuri dokumen yang berhubungan dengan kegiatan fasilitasi seperti : proposal, perjanjian kerjasama, rencana usulan kegiatan dan rencana anggaran biaya serta dokumen pendukung lainnya.
- Kunjungan lapangan (sample lokasi kegiatan fasilitasi) untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dilapangan dengan rencana dan biaya yang telah dianggarkan, serta tata waktunya.
- Pertemuan online melalui aplikasi zoom clouds meeting dengan semua ketua dan penyuluh pendamping Wanawiyata Widyakarya penerima fasilitasi.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap kegiatan Fasilitas Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2023, baik pada sisi aspek perencanaan dan pelaksanaan, serta pencapaian target kegiatan fasilitasi telah dilaksanakan dan sesuai dengan rencana dan tata waktu yang telah ditetapkan, walaupun di beberapa Wanawiyata Widyakarya masih mengalami beberapa kendala dan hambatan. Hambatan dan kendala pelaksanaan fasilitasi, antara lain :

- Sebagian besar SDM Wanawiyata Widyakarya dan penyuluh kehutanan pendamping, kurang berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi, terutama pada sisi pertanggung jawaban administrasi kegiatan.
- Keberadaan Wanawiyata Widyakarya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat, belum begitu dikenal, baik oleh masyarakat umum itu sendiri maupun oleh instansi pemerintah lainnya;
- Masyarakat umum belum begitu tertarik untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pemagangan di lembaga Wanawiyata Widyakarya, dikarenakan masyarakat lebih cenderung belajar lewat aplikasi media social seperti youtube dll

WANAWIYATA WIDYAKARYA KELOMPOK TANI MANDIRI
Nganggring, Girikerto, Turi, Sleman, DIY

Ketua : Marimin (085725429255)
Penyuluh Pendamping : Umassarah, SP (08121572695)

Paket kegiatan

- Study banding
- Pemagangan
- Pelatihan
- Eduwisata

Usaha

Hutan rakyat
Luas 40 Ha, produktivitas 24 m³ omset Rp. 16.280.000/tahun

Kambing PE
Jumlah 500 ekor, produksi susu 28800liter /tahun omset Rp. 489.600.000/tahun

Pupuk organik
Produksi 3600 kg/tahun omset Rp. 5.040.000/tahun

Sabun susu
omset Rp.2.400.000 /tahun

Materi Pelatihan/Pemagangan

- Pengelolaan Hutan Rakyat
- Budidaya Kambing Peranakan Etawa (PE)
- Pembuatan Pupuk Organik
- Pengolahan Sabun Susu Kambing PE

Fasilitas

- Modul
- Lingkungan belajar yang nyaman
- Sarpras praktek lengkap
- Narasumber berpengalaman
- Konsumsi dan akomodasi
- Sertifikat

Belajar bersama untuk petani berDAYA lingkungan terJAGA

SIAP!!! MENYELENGGARAKAN PELATIHAN & PEMAGANGAN

WANAWIYATA WIDYAKARYA KTH PETANI MUDA PRAWITA
SK. MENTERI LHK : NO. SK. 1054/MENLHK/P2SDM/UM/KEU/1/3/2021
Jl Raya Ajbarang - Gumelar, Desa Darmakiradenan RT 04 RW 02
Kec. Ajbarang, Kali Banyumas, Jawa Tengah

KETUA
Teguh Waluyo, S.Pd
082344404834
081215387137

MATERI FASILITATOR

- Budidaya Lebah Madu - Teguh Waluyo, S.Pd
- Budidaya Tanaman - Oso Suharto, S.P
- Wisata Edukasi - Wilujeng Prawitasari, A. Md

PENYULUH PENDAMPING
Sutaryo, S.P
081327357497

FASILITAS

- Materi
- Homestay
- Konsumsi & Akomodasi
- Sertifikat

MITRA

CV PRAWITA
(Garden - Bee Farm - Cafe - Homestay)

- Suplayer hasil Perlembahan & Tanaman
- Desain Landscape Ternak Lebah
- Suplayer bibit tanaman
- Desain Landscape kebun

BUKTI PRAKTIK

- Pelatihan Pemandu Wisata
- Pelatihan Homestay

PEMEDIK DARMASAKSIAN

- Desa Wisata
- Proklamasi
- Wisata Alam Gua Karang Terata

BUKTI PRAKTIK

- Produksi 30 kg/ bulan Omset Rp. 4.500.000/ bulan
- Produksi 10 kg/ bulan Omset Rp. 1.000.000/ bulan
- Produksi 200 bibit/ bulan Omset Rp. 500.000/ bulan
- Produktifitas 100 orang/ bulan Omset Rp. 500.000/ bulan (mendukung kurikulum mendidik)

USAHA

BUDIDAYA LEBAH KLANCING
Produktifitas 30 kg/ bulan Omset Rp. 4.500.000/ bulan

BUDIDAYA LEBAH APIS CERANA
Produktifitas 10 kg/ bulan Omset Rp. 1.000.000/ bulan

BUDIDAYA LEBAH TANAMAN BUAH & PAKAN LEBAH
Produktifitas 200 bibit/ bulan Omset Rp. 500.000/ bulan

KEBUN BUAH & PETERNAKAN LEBAH
Produktifitas 100 orang/ bulan Omset Rp. 500.000/ bulan (mendukung kurikulum mendidik)

PRAWITA GARDEN OFFICIAL prawita_garden prawitagarden.business.site

Prawita Garden "kebun buah & peternakan lebah madu murni"

Success Story

LP2UKS YANG DIBENTUK DAN DIKEMBANGKAN

WANAWIYATA WIDYAKARYA BINA MANDIRI

Sutera dikenal memiliki keindahan dan serat yang halus sehingga bisa diolah untuk dibuat menjadi berbagai jenis produk pakaian seperti kain tenun, batik, kebaya dan sarung yang khas dan berkkelas. Saat ini kebutuhan benang sutera nasional masih mengandalkan impor padahal Indonesia mempunyai potensi besar untuk bisa menjadi pusat eksportir sutera.

Secara geografis dan geologis, Indonesia punya iklim dan kondisi lahan yang sangat sesuai untuk pembudidayaan ulat sutera (*Bombyx mori*). Dengan permintaan pasar yang besar, maka budidaya ulat sutera bisa menjanjikan penghasilan bagi petani, terutama yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Bagi masyarakat yang berminat dengan sutera, mereka bisa belajar ke Wanawiyata Widyakarya Bina Mandiri di Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Bina Mandiri ditetapkan sebagai Wanawiyata Widyakarya pada tahun 2015 melalui SK Kepala Kepala Pusat Penyuluhan Nomor 17/PUSLUH-1/2015, diketuai oleh Edi Yusuf dan didampingi Penyuluh Kehutanan U. Muflih, S.Hut.



Sebagai wanawiyata widyakarya, KTH Bina Mandiri mendapat dukungan sarana dan prasarana yaitu pada tahun 2023 Bina Mandiri mendapatkan fasilitasi pengembangan wanawiyata widyakarya. Dana fasilitasi Pengembangan Wanawiyata Widyakarya sebesar Rp 20.000.000,- digunakan untuk pengembangan usaha, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelatihan dan pemagangan, peningkatan kapasitas SDM Wanawiyata Widyakarya, Instentif Penyuluh Pendamping dan pelaporan. Selain memanfaatkan dana dari fasilitasi, pengembangan wanawiyata widyakarya juga menggunakan dana swadaya kelompok yang digunakan untuk penambahan poulsasi tanaman murbei, penyusunan bahan ajar dan penyusunan promosi serta penyusunan paket pelatihan.



Wanawiyata Widyakarya Bina Mandiri diharapkan bisa mentrasfer ilmu pengetahuannya ke masyarakat lain melalui pelatihan dan pemagangan, sehingga muncul wirausahawan-wirausahawan baru. Berkat dukungan dan dampak dari kegiatan pemagangan, Bina Mandiri telah bermitra dengan 8 kelompok tani yang tersebar di wilayah Sukabumi dan Cianjur. Jika semakin banyak kelompok tani yang berlatih dan magang di wanawiyata widyakarya, harapan untuk memacu produksi sutera nasional dapat terwujud. Dari hasil fasilitasi pengembangan wanawiyata widyakarya, sekarang WW Bina Mandiri mempunyai sarana dan prasarana yang lebih lengkap untuk menunjang kegiatan pelatihan/magang, mempunyai materi-materi pembelajaran, matriks materi dan kapasitas SDM pengelolanya meningkat. Sampai dengan bulan September 2023 Wanawiyata Widyakarya Bina Mandiri menyumbang Nilai Transaksi Ekonomi sebesar Rp 67.335.000,-

WANAWIYATA WIDYAKARYA PULEPAYUNG

Kelompok Tani Hutan (KTH) Pulepayung beralamatkan di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten kulonprogo Provinsi D.I. Yogyakarta, berdiri sejak tahun 2016 yang diketuai oleh Sukamto dan penyuluh kehutanan pendampingnya adalah Suroso, SP. Kegiatan usahanya adalah hutan rakyat kemudian berkembang ke sektor usaha lain yaitu peternakan, budidaya lebah madu dan jasa lingkungan Bukit Wisata Pulepayung. Usaha yang baru saja dirintis adalah jasa lingkungan dengan membangun wisata alam, yang sudah dikunjungi peminat keindahan alam di Perbukitan Menoreh. Di Kawasan wisata alam ini juga sudah digunakan untuk out bond dari beberapa sekolah di Kabupaten Kulon Progo dan Perguruan Tinggi di Yogyakarta.

Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Pulepayung untuk wisata alam 1,2 Ha, 81.250 orang, Rp.270.000.000,-, lebah madu 30 liter Rp.4.000.000,-, bibit kambing 135 ekor Rp. 67.000.000,-.



3.6. REALISASI ANGGARAN

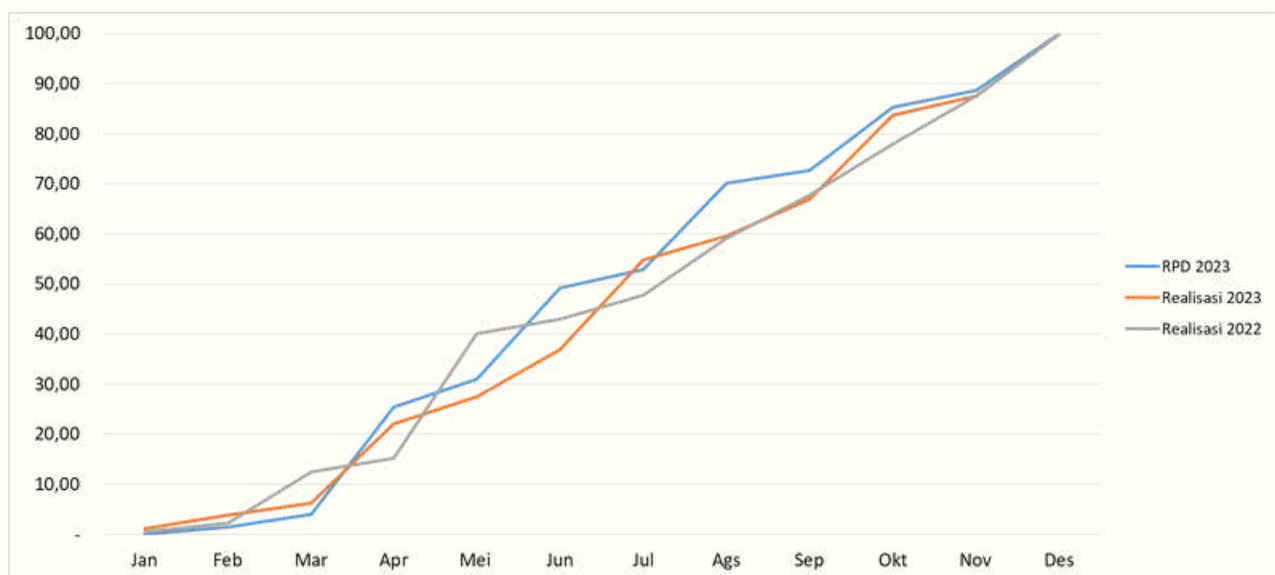
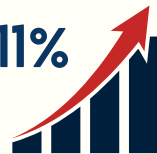
TREN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Berdasarkan aplikasi OMSPAN (perekaman tanggal 10 Januari 2024), pada Tahun 2023 Pusat Penyuluhan dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp. 16.641.306.997,- atau 99,98%. Persentase realisasi anggaran Pusat Penyuluhan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tren realisasi keuangan terhadap Rencana Penarikan Dana Pusat Penyuluhan Tahun 2023 sebagaimana Gambar 3.5. sebagai berikut :

99,98% Realisasi Anggaran Tahun 2023

0,11%

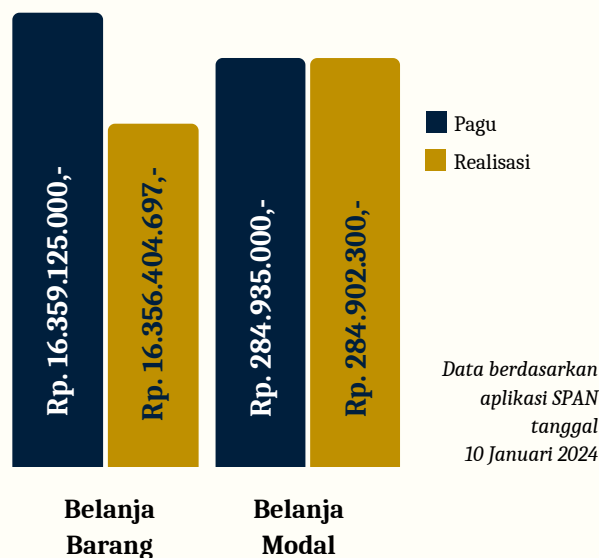
Dibandingkan dengan bulan yang sama pada periode tahun 2022



Gambar 3.5. Perbandingan Tren Realisasi Anggaran Tahun 2022-2023

REALISASI PER JENIS BELANJA

Proporsi anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2023 berdasarkan jenis belanja yaitu belanja barang sebesar Rp. 16.359.125.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 284.935.000,-. Hingga bulan Desember 2023, serapan anggaran belanja barang sebesar 99,98% dan belanja modal 99,99%. Hal ini menunjukkan bahwa Pusat Penyuluhan dapat merealisasikan seluruh anggaran secara optimal pada setiap jenis belanja. Realisasi belanja barang dan belanja modal Pusat Penyuluhan dapat dijelaskan sebagaimana Gambar 3.6. berikut.



Gambar 3.6. Realisasi belanja barang dan belanja modal Pusat Penyuluhan

REALISASI PER RINCIAN OUTPUT

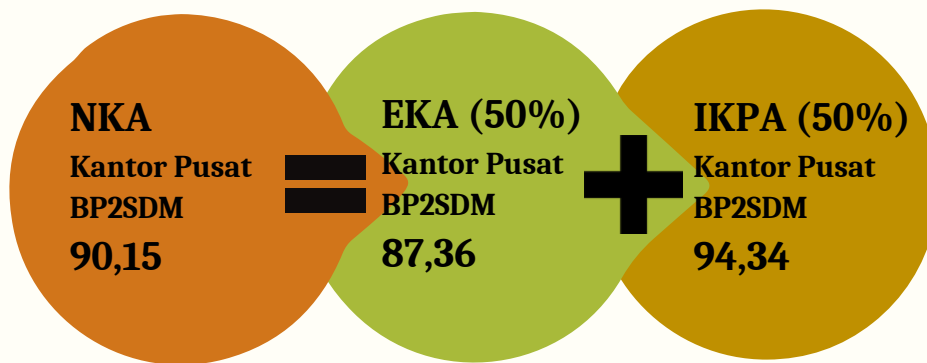
Realisasi anggaran Pusat Penyuluhan per rincian output dapat dilihat secara rinci sebagaimana Tabel 3.9. berikut ini.

Tabel 3.9. Realisasi anggaran per rincian output.

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	2.499.607.000	2.498.967.400	99,97
KTH Mandiri	793.000.000	792.600.913	99,95
Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	680.500.000	680.359.172	99,98
Layanan Umum	10.891.500.000	10.890.493.754	99,99
Layanan Sarana Internal	284.935.000	284.902.300	99,99
Layanan Perkantoran	1.494.518.000	1.493.983.458	99,96
Total	16.644.060.000	16.641.306.997	99,98

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)

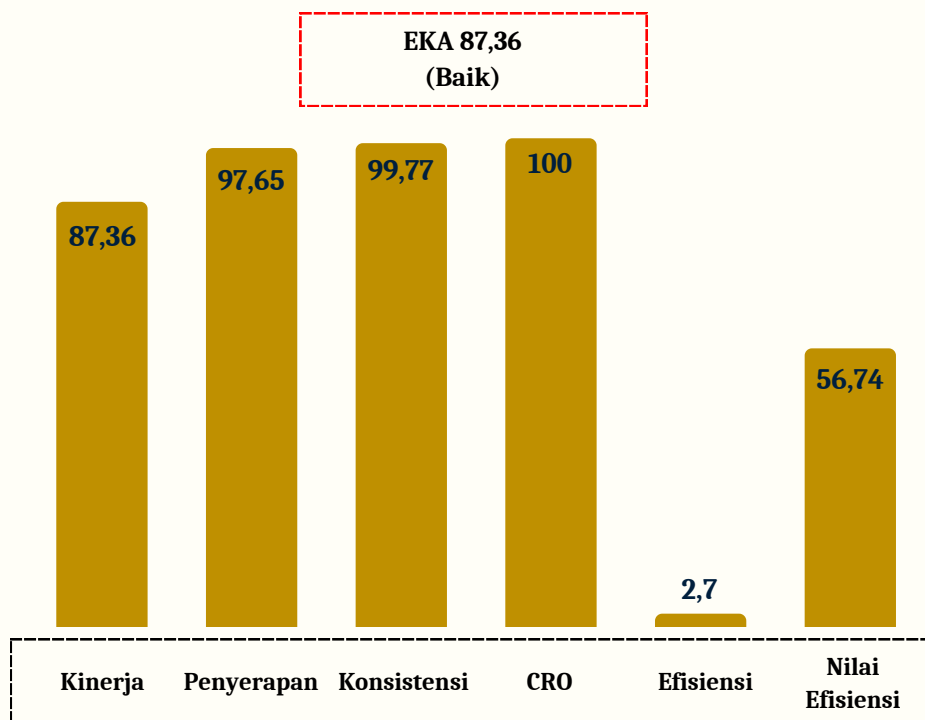
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah gabungan dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada aplikasi SMART dengan bobot 50% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi OMSPAN dengan bobot 50%. Sampai dengan Bulan Desember 2023, Pusat Penyuluhan yang merupakan Sub Satker pada Kantor Pusat Badan P2SDM memperoleh NKA sebesar 90,15.



Data berdasarkan aplikasi SMART dan OMSPAN tanggal 10 Januari 2024

EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Badan P2SDM s.d Bulan Desember Tahun 2023 berdasarkan aplikasi SMART sebesar 87,36 poin.

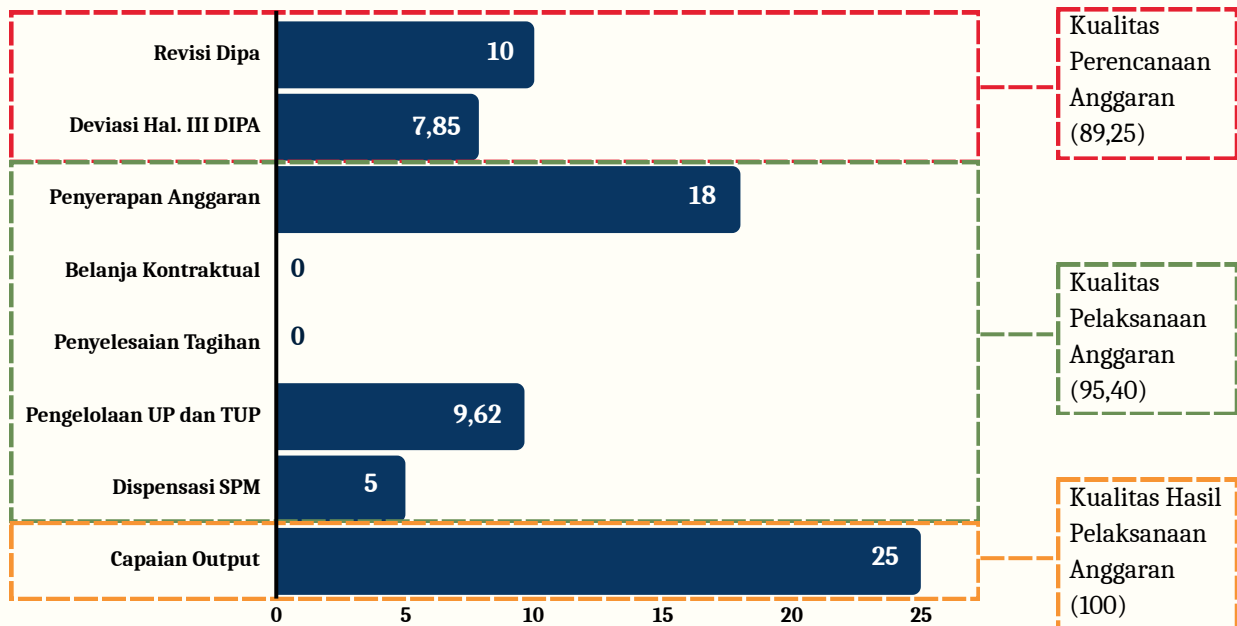


Data berdasarkan aplikasi SMART dan OMSPAN tanggal 10 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

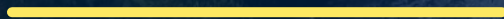
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang diukur berdasarkan 8 Indikator

**NILAI IKPA
SATKER KANTOR
PUSAT BP2SDM
94,34 POIN
(SANGAT BAIK)**



Data berdasarkan aplikasi SMART dan OMSPAN tanggal 10 Januari 2024

4 PENUTUP



Laporan Kinerja (LKj) Pusat Penyuluhan Tahun 2023 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Penyuluhan dengan mengacu pada Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun kesimpulan dari Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan, yaitu:

1. Capaian kinerja Pusat Penyuluhan tahun 2023 sebesar 100% menunjukkan bahwa semua target kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,98% dan nilai efisiensi capaian kinerja terhadap penggunaan anggaran sebesar 1 serta pencapaian kinerja telah dilakukan dengan efektif.
2. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, yaitu :
 - a. Situasi dan kondisi pemulihan dari pandemi C O V I D-19 menyebabkan sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda dan dilakukan secara virtual diantaranya pertemuan kelompok dan sosialisasi yang mengumpulkan banyak orang untuk pemenuhan syarat-syarat administrasi izin produk KTH. Kurangnya pengetahuan SDM pengelola KTH dan sebagian Penyuluh Kehutanan terhadap pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan pengelola KTH dan Penyuluh Kehutanan kurang optimal dalam menerima informasi terkait sosialisasi pelaksanaan kegiatan.
3. Untuk menindaklanjuti permasalahan, upaya yang telah dilaksanakan meliputi :
 - a. Peningkatan koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan KTH Mandiri antara KTH, Penyuluh Kehutanan pendamping, KPH, CDK dan Dinas LHK Provinsi yang bersangkutan untuk mendukung kelancaran kegiatan.
 - b. Dalam rangka adaptasi dengan kondisi pandemi C O V I D - 1 9 dan mendukung kegiatan berjalan sesuai dengan target, Pusat Penyuluhan menyelenggarakan sosialisasi kegiatan, bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan KTH Mandiri dan LP2UKS secara virtual.
4. Berdasarkan hasil pembahasan Bab III Akuntabilitas Kinerja, rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan selanjutnya, yaitu :
 - a. Kebijakan pimpinan Badan P 2 S D M dan Satker yang responsif, akomodatif dan adaptif dalam merespon situasi dengan kebutuhan seperti :

- 1) Percepatan pelaksanaan kegiatan terutama yang terkait dengan belanja 526 (Fasilitasi KTH Mandiri, Pembentukan Wanawiyata Widyakarya dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya) yang dapat menstimulasi pemulihan ekonomi di masyarakat. Pencairan anggaran fasilitasi di Triwulan I memungkinkan dampak dan manfaat kegiatan dapat dievaluasi di akhir tahun.
- 2) Perencanaan kegiatan secara *bottom up* dengan mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan-permasalahan target sasaran secara spesifik baik untuk menentukan langkah-langkah intervensi dan pencapaian kinerja.
- b. Pembinaan yang dilaksanakan secara terus menerus pada KTH penerima fasilitasi sehingga proses administrasi maupun pendampingan dapat berjalan secara lancar.
- c. Pelibatan pakar akademisi dan praktisi pada kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping handal serta fasilitasi dan pembinaan KTH agar pencapaian kinerja lebih tepat sasaran.
- d. Pelaksanaan evaluasi dampak dan manfaat kegiatan sebagai masukan dan pertimbangan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak mengenai tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan. Secara internal Laporan Kinerja ini dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Pusat Penyuluhan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si.

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. A. Palguna Ruteka

Jabatan : Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan *pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan*. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2022

Pihak Kedua,

Drs. A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

Pihak Pertama,

Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si.
NIP. 19630705 198303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT PENYULUHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Penyuluh	Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal)	1.000 Orang
2.	Meningkatnya Kemandirian	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	30 Unit
3.	Kelembagaan Kelompok Masyarakat	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	20 Unit

No. Program/Kegiatan

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

1. Peningkatan Penyuluhan
2. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan

Anggaran
Rp20.621.842.000,-

Program Dukungan Manajemen

3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Rp16.583.235.000,-

Pihak Kedua,



Drs. A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

Jakarta, 20 Desember 2022

Pihak Pertama,



Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si.
NIP. 19630705 198303 1 001

TARGET TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT PENYULUHAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kapasitas Penyuluh	Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal)	1.000 Orang	100 Orang	400 Orang	700 Orang	1.000 Orang
2.	Meningkatnya Kemandirian	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	30 Unit	-	10 Unit	20 Unit	30 Unit
3.	Kelembagaan Kelompok Masyarakat	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	20 Unit	-	5 Unit	15 Unit	20 Unit

Catatan:

B03 : Target Triwulan I
B06 : Target Triwulan II
B09 : Target Triwulan III
B12 : Target Triwulan IV

Jakarta, 10 Desember 2022


Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si.
NIP. 19630705 198303 1 001

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Pusat Penyuluhan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. A. Palguna Ruteka

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Desember 2023

Pihak Kedua,


Drs. A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

Pihak Pertama,


Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2023
PUSAT PENYULUHAN

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya Kapasitas Penyuluh	Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal)	1.000 Orang
2.		Meningkatnya Kemandirian	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	30 Unit
3.		Kelembagaan Kelompok Masyarakat	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	20 Unit

Klarifikasi rincian output (KRO)/Rincian Output (RO)

Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran (Rp)
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kapasitas Penyuluh dan/atau Pendamping yang Handal	1.000 Orang	2.499.607.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	KTH Mandiri yang terbentuk	30 Unit	793.000.000
	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	20 Unit	680.500.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran (Belanja Operasional)	1 Layanan	1.414.518.000
	Layanan Umum	1 Layanan	10.891.500.000
EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	1 Paket	284.935.000
TOTAL			16.564.060.000

Jakarta, 1 Desember 2023

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM



Drs. A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

Plt. Kepala Pusat Penyuluhan



Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001

RENCANA AKSI REVISI TAHUN 2023
PUSAT PENYULUHAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Target Output Bulanan											
						Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Meningkatkan Kemandirian Kelembagaan Kelompok Masyarakat	Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal)	Kapasitas Penyuluh dan/atau Pendamping yang Handal	2.499.607.000	1.000	Orang	-	-	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	KTH Mandiri yang terbentuk	793.000.000	30	Unit	-	-	-	-	10	10	10	20	20	20	20	30
Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	680.500.000	20	Unit	-	-	-	-	5	5	10	10	15	15	15	20

Jakarta, 1 Desember 2023
Kepala Pusat Penyuluhan


Wanju Rudianto, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001







BP2SDM
KLHK

SCAN ME!



pustuh klhk



@pustuhklhk



@pustuhklhk



PUSLUH KLHK



pustuh.bp2sdm.menlhk.go.id